

PANEL PENASIHAT INDEPENDEN TANGGUH
(Tangguh Independet Advisory Panel - TIAP)

LAPORAN PERTAMA
MENGENAI OPERASIONAL
DAN
PROPOSAL
PENGEMBANGAN
PROYEK LNG TANGGUH

MEI 2014

DAFTAR ISI

I.	Kata Pengantar	Error! Bookmark not defined.
II.	Perkembangan Operasional dan Wilayah Sekitar Terkini ..	Error! Bookmark not defined.
III.	Proposal Pengembangan Tangguh dan AMDAL Baru.....	Error! Bookmark not defined.
IV.	Perkembangan Politik dan Keamanan	Error! Bookmark not defined.
V.	Keamanan dan Hak Asasi Manusia di Tangguh	Error! Bookmark not defined.
VI.	Program untuk kampung-kampung DAV dan Area Yang Terkena Dampak Langsung	Error! Bookmark not defined.
VII.	Ketenagakerjaan Masyarakat Papua, Pelatihan dan Pengadaan	Error! Bookmark not defined.
VIII.	Hubungan Pemerintah dan Urusan Publik.....	Error! Bookmark not defined.
IX.	Tata Kelola dan Transparansi	Error! Bookmark not defined.
X.	Pengelolaan Pendapatan Tangguh	Error! Bookmark not defined.
XI.	Lingkungan	Error! Bookmark not defined.
XII.	Manfaat Jangka Panjang bagi Provinsi	Error! Bookmark not defined.

SINGKATAN DAN ISTILAH

Adat	Kebiasaan lokal dan tradisional, hukum dan sistem penyelesaian pertikaian yang banyak digunakan di Indonesia
AMDAL	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
ADB	Asian Development Bank (Bank Pembangunan Asia)
BBDF	Bintuni Bay Development Foundation (Yayasan Pembangunan Teluk Bintuni -YPTB)
BPMIGAS	Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas – lembaga pemerintah Indonesia yang merupakan regulator dalam Proyek Tangguh (yang dinyatakan inkonstitusional dan dibubarkan tahun 2012)
BPK	Badan Pemeriksa Keuangan
Brimob	Brigade Mobil
Bupati	Kepala daerah kabupaten
CAP	Community Action Plan (Rencana Aksi Masyarakat – program dukungan untuk memfasilitasi proyek pembangunan berbasis masyarakat di kampungkampung yang terkena dampak langsung
DAV	Kampung-kampung yang Terkena Dampak Langsung merupakan kampung yang sejak awal diidentifikasi sebagai daerah yang terkena dampak langsung proyek LNG Tangguh
Dinas	Dinas
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
EITI	Extractive Industries on Transparency Initiative (Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif)
ENR	Energi dan Sumber Daya Alam
GOI	Pemerintah Indonesia
ICBS	Program Pengamanan Terpadu Berbasis Masyarakat

ICITAP	Kantor Program Pendampingan Pelatihan Investigasi Internasional di bawah Departemen Kehakiman AS
IPB	Institut Pertanian Bogor
ISP	Program Sosial Terpadu – unit pelaksana dalam Proyek Tangguh dan program pengembangan sosial ekonomi yang dikelola oleh unit tersebut
JUKLAP	Petunjuk Lapangan untuk Keamanan
JUKLAP/PAMBERS	Petunjuk Lapangan Pengamanan Bersama - pembaruan dan perpanjangan kesepakatan JUKLAP di tahun 2009
kabupaten	Distrik atau kabupaten
Kapolda	Kepala Kepolisian Daerah
Kapolres	Kepala Kepolisian Resor
Kota	Kota
LARAP	Rencana Kerja Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali – rencana kerja pemukiman kembali Proyek Tangguh yang menggambarkan dampak pemukiman kembali di luar kemauan sendiri
LNG	Gas alam cair
MOE	Kementerian Lingkungan Hidup
MOF	Kementerian Keuangan
MOU	Nota Kesepahaman
MRP	Majelis Rakyat Papua – badan perwakilan yang terdiri dari pemimpin agama, adat, dan perempuan, yang dibentuk berdasarkan UU Otonomi Khusus
NGO	Non Government Organization (Lembaga Swadaya Masyarakat)
OECD	Organisasi bagi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan
OPM	Organisasi Papua Merdeka – organisasi separatis
Otsus	Otonomi Khusus

Pangdam	Panglima Komando Daerah Militer
Perdasus DBH	Peraturan Otonomi Khusus yang disahkan oleh DPRD dan disetujui oleh MRP untuk mengalokasikan pendapatan minyak dan gas (DBH)
PLN	Perusahaan Listrik Negara
Proper	Program audit nasional Kementerian Lingkungan Hidup
UGM	Universitas Gadjah Mada
RAV	Resettlement Affected Village (Kampung yang sejak awal teridentifikasi oleh Proyek Tangguh sebagai daerah yang terkena dampak pemukiman kembali – Tanah Merah Baru, Saengga, dan Onar)
SBY	Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono
SKJ	Surat Keterangan Jalan
SKKMIGAS	Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas, lembaga pemerintah Indonesia yang merupakan regulator dalam Proyek Tangguh (yang menggantikan BPMIGAS)
SOP	Standard Operational Procedure (Prosedur Operasional Standar)
THCU	Tangguh Health Care Unit (Unit Kesehatan Masyarakat Tangguh)
TIAP	Tangguh Independent Advisory Panel (Panel Penasihat Independen Tangguh)
TNI	Tentara Nasional Indonesia
TSDP	Tangguh Sustainability Development Program (Program Pembangunan Keberlanjutan Tangguh – program sosial Tangguh yang akan menggantikan ISP sesuai AMDAL baru yang mengatur pengembangan Tangguh)
UNIPA	Universitas Negeri Papua
UP4B	Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat
VAT	Value Additional Tax (Pajak pertambahan nilai)
YSA	Yayasan Sosial Augustinus – yayasan lokal

I. Kata Pengantar

Panel Penasihat Independen Tangguh (*“Tangguh Independent Advisory Panel - TIAP”* atau *“Panel”*) dibentuk untuk memberikan saran eksternal bagi para pengambil keputusan papan atas BP berkenaan dengan aspek non-komersial Proyek LNG Tangguh (*“Proyek”*), serta bertujuan khusus untuk memberi saran kepada BP agar Tangguh dapat mewujudkan potensinya sebagai model pembangunan kelas dunia. Panel saat ini diketuai mantan Senator Amerika Serikat Tom Daschle yang pernah menjabat sebagai Pemimpin Mayoritas Senat AS, serta termasuk diantaranya Augustinus Rumansara, warga Papua yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Panel Penilaian Kepatuhan Bank Pembangunan Asia (*“ADB”*) dari tahun 2003 hingga 2008, Penasihat Gubernur Papua dari tahun 2008 sampai 2010, serta saat ini menjabat sebagai Ketua Satgas Pembangunan Rendah Karbon Papua.¹ Panel menggunakan jasa konsultasi dan sekretariat independen dari firma hukum DLA Piper yang dikepalai oleh partner senior, Gary Klein.² Panel yang saat ini bertugas dibentuk pada tahun 2009 dan masa tugasnya telah diperpanjang oleh BP hingga April 2017.

Laporan ini adalah laporan lengkap ketiga yang dihasilkan oleh Panel dan dibuat pada waktu yang unik. BP baru saja menyelesaikan fase konsultasi publik untuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (*“AMDAL”*) yang akan menjadi landasan komitmen selama konstruksi proyek pengembangan Tangguh dari tahun 2014 hingga tahun 2019 dan sepanjang masa operasionalnya. TIAP tidak akan mengkritik setiap komitmen yang berbasis masyarakat dan didukung pemerintah. Meski demikian, laporan ini mencoba menyumbangkan pengalaman dan masukan dari TIAP kepada tiap topik yang dibahas serta membantu memandu BP untuk mengimplementasikan komitmen-komitmen tersebut. Seperti laporan-laporan TIAP sebelumnya, laporan ini akan diserahkan kepada BP, serta dipresentasikan dan dibahas dengan pihak-pihak berkepentingan di Jakarta, London dan Washington, D.C.³

¹ Untuk keperluan laporan ini, istilah *“Papua”* mengacu pada wilayah yang mencakup Provinsi Papua maupun Provinsi Papua Barat. Istilah *“Provinsi Papua”* mengacu pada Provinsi Papua setelah pemekaran Provinsi Papua Barat. Istilah *“Papua Barat”* mengacu pada Provinsi Papua Barat (sebelumnya disebut Irian Jaya Barat) setelah dibentuk pada tahun 2004. Peta Papua yang menunjukkan lokasi-lokasi penting terkait dengan Proyek Tangguh ada di Apendiks I.

² Panel sebelumnya, yang memantau fase konstruksi Proyek, diketuai oleh mantan Pemimpin Mayoritas Senat AS George Mitchell dan beranggotakan Lord Hannay of Chiswick, Duta Besar Sabam Siagian dan Pastor Herman Saud.

Sebagai tambahan dari kegiatan TIAP, Tangguh juga diawasi oleh Grup Pemberi Pinjaman Tangguh (diwakili oleh ADB sampai 2014, Japan Bank for International Cooperation dan Mizuho Corporate Bank), yang telah membentuk panel eksternal dengan beranggotakan pakar independen yang rutin mengunjungi Tangguh. Sampai tahun 2014, tepatnya saat pinjaman dari ADB telah lunas, tinjauan kepatuhan yang mereka lakukan dipublikasikan di situs web ADB. Tinjauan mereka terbatas pada isu keselamatan, lingkungan, pemukiman kembali, dan program-program sosial; laporan terakhir mereka dibuat pada bulan Juli 2013. Selama pembiayaan belum ditetapkan, belum diketahui secara pasti apakah panel pemberi pinjaman akan memonitor isu-isu khusus terkait konstruksi pengembangan fasilitas Tangguh. Sebagai bentuk penghargaan atas hasil kerja Grup Pemberi Pinjaman Tangguh, TIAP fokus pada hal-hal terkait keamanan, hak asasi manusia, tata kelola, pengelolaan pendapatan, iklim politik dan isu-isu lebih luas mengenai bagaimana Tangguh mempengaruhi masyarakat Teluk Bintuni dan Papua, serta persepsi mereka terhadap Proyek. Faktor-faktor ini berkaitan langsung dengan kemampuan BP untuk menjadikan Tangguh sebagai model pembangunan kelas dunia.

Di bulan Maret 2014, TIAP telah mengunjungi Jayapura, Manokwari dan Teluk Bintuni di Papua, serta Jakarta. Panel mengadakan dengan Menteri, pejabat pemerintah lain dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Pangdam TNI Papua, Kapolda Papua, Rektor Universitas Negeri Papua (“UNIPA”), tim Universitas Gadjah Mada (“UGM”) yang mengerjakan sensus dan menangani isu-isu pengelolaan pendapatan, serta perwakilan Kedutaan Amerika Serikat dan Inggris.⁴ TIAP menghabiskan beberapa hari di Kabupaten Teluk Bintuni dan telah menemui Bupati dan beberapa pemimpin kabupaten dan kampung lain, penduduk dari kampung di pesisir utara dan selatan, karyawan Papua terampil di Tangguh, mitra pelaksana BP serta personel BP yang menjalankan manajemen, kegiatan operasional, program pengembangan penduduk Papua dan operasi keamanan di kilang LNG.

³ Laporan ini berikut tanggapan BP akan dimuat di situs web BP. *Lihat* <http://www.bp.com/sectiongenericarticle.do?categoryId=9004751&contentId=7008791>

⁴ Lihat Apendiks II untuk daftar lengkap pemangku kepentingan yang diajak berkonsultasi oleh TIAP dalam kunjungannya di bulan Maret 2014.

Panel meninjau program-program dan kegiatan BP berdasarkan norma-norma global saat ini yang menghasilkan sejumlah praktik terbaik untuk proyek di negara-negara berkembang. Norma-norma tersebut mencakup Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia; Panduan Organisasi bagi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (Organization for Economic Cooperation and Development- OECD) Bagi Perusahaan Multinasional; Konvensi Organisasi Buruh Internasional Mengenai Penduduk Asli dan Suku-Suku di Negara Merdeka; Petunjuk Operasional Bank Dunia terkait penduduk asli; dan Prinsip-Prinsip Sukarela Keamanan dan HAM AS-Inggris (Prinsip-Prinsip Sukarela Keamanan). Panel juga meninjau Proyek berlandaskan panduan global terbaru yang mencakup Prinsip Panduan PBB di bidang Usaha dan Hak Asasi Manusia (“Prinsip Panduan”); Standar Kinerja IFC di bidang Lingkungan Hidup dan Sosial yang Berkelanjutan; dan Prinsip Ekuator (yang hanya dapat diterapkan secara langsung di lembaga keuangan).

Panel tidak mengaudit kepatuhan BP terhadap peraturan hukum nasional atau lokal, tetapi meninjau kepatuhan BP terhadap AMDAL (yang mengatur komitmen sosial dan lingkungan BP), yang kini akan mencakup AMDAL baru terkait pengembangan Proyek.⁵ Panel memperoleh akses penuh ke seluruh informasi yang diminta serta kebebasan penuh dalam melakukan penyelidikan dan menyampaikan temuannya. Kesimpulan dan rekomendasi dalam laporan ini murni berasal dari TIAP. Panel mengharapkan BP menyampaikan tanggapan terhadap setiap rekomendasi Panel dan, seperti disebut di atas, siap mengadakan pertemuan terbuka dengan pihak-pihak berkepentingan untuk membahas laporan ini dan tanggapan dari BP di London, Washington, D.C. dan Jakarta.

TIAP telah mengidentifikasi isu-isu umum yang harus diprioritaskan BP di masa yang akan datang:

1. **Pengembangan Tangguh.** *Dalam lima tahun ke depan, Tangguh akan mendatangkan ribuan pekerja baru ke Teluk Bintuni. Hal ini akan meningkatkan ancaman terhadap keamanan, keselamatan, kesehatan, mata pencaharian dan budaya lokal, yang mana sekaligus memberikan peluang baru untuk pembangunan ekonomi.*

⁵ Lihat bagian III di bawah. Salinan AMDAL pertama tersedia di

BP tak hanya harus menangani ancaman-ancaman ini secara langsung, tetapi juga harus memastikan bahwa para kontraktornya mematuhi komitmen BP. Pengawasan efektif berbasis kontrak terhadap kontraktor dan subkontraktor amat penting untuk meminimalkan ancaman dan memaksimalkan peluang tersebut.

2. **Bantuan bagi Penduduk Asli.** *Selama sepuluh tahun terakhir, BP telah menjadi bagian integral bagi masyarakat Papua dan telah menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk Teluk Bintuni dan kampung-kampung di sekitar Tangguh. Seiring pengembangan Tangguh, BP tak boleh kehilangan fokus terhadap program-program sosial di wilayah tersebut, terutama di bidang pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pembangunan ekonomi, melalui kemitraan dengan pemerintah daerah dan LSM. Upaya berkelanjutan ini amat dibutuhkan untuk memastikan bahwa berbagai terobosan penting yang telah dicapai di bidang-bidang tersebut dalam beberapa tahun terakhir tak hanya dipertahankan, tetapi juga diperluas dan dikembangkan di masa depan.*
3. **Elektrifikasi.** *Elektrifikasi Kota Bintuni menunjukkan pentingnya bantuan ini bagi sikap masyarakat lokal. Elektrifikasi di berbagai kota dan kampung di Teluk Bintuni akan menghilangkan sumber ketegangan dan kecemburuan yang awalnya disebabkan oleh elektrifikasi yang dilakukan Tangguh terhadap kampung RAV di pesisir selatan. Hal ini akan meningkatkan kualitas hidup tetangga-tetangga Tangguh secara materiil. BP harus bekerja sama dengan PLN untuk melakukan elektrifikasi pada tahun ini.*
4. **Pemukiman Pesisir Utara.** *Pemukiman yang tidak merata akibat dari ketimpangan distribusi bantuan masih menjadi salah satu isu jangka panjang paling penting, karena isu ini menciptakan ketegangan antara penduduk kampung di pesisir utara dan pesisir selatan. Terlepas dari beberapa iktikad baik untuk mengatasinya, masalah ini belum tuntas. AMDAL baru untuk pengembangan dan kesepakatan terkait perdasus yang mengatur dana bagi hasil merupakan landasan kuat untuk kembali mencoba mengatasi masalah tersebut. BP harus memanfaatkan peluang ini.*

5. **Pengembangan Penduduk Papua.** *Komitmen dalam AMDAL untuk mempekerjakan penduduk Papua di semua tingkat dan mendukung pengembangan karier mereka secara vertikal dan horizontal dalam perusahaan masih merupakan tantangan serius. Komitmen jajaran senior sudah jelas. Tapi komitmen ini harus ditransfer ke tingkat manajemen yang lebih rendah, yang harus didorong, dengan melalui target dan penghargaan, untuk melatih, membimbing, dan mendukung rencana pengembangan personal (PDP) karyawan Papua. Perhatian khusus harus diberikan kepada karyawan Papua yang handal dari Teluk Bintuni dan sekitarnya.*

II. Perkembangan Operasional dan Wilayah Sekitar Terkini

Tangguh Kilang 1 dan 2 telah beroperasi sejak 2009. Meski salah satu tangki penyimpanan LNG tak beroperasi pada tahun 2013, kilang beroperasi secara aman dan efisien serta mencetak rekor dengan memproduksi 114 kargo, sekaligus mengurangi gas suar bakar menjadi 0,6% dari gas umpang di tahun 2013.⁶ Kapal tanker LNG melakukan pemuatan beberapa kali dalam seminggu. Perahu operasional dan feri karyawan selalu aktif bahkan saat tak ada kegiatan konstruksi. Keselamatan selalu menjadi prioritas utama. Tingkat keselamatan di kilang terus membaik, tercatat bahwa kejadian kecelakaan telah turun 50% sejak 2012 dan 80% sejak 2010, ke tingkat .02 (satu kejadian kecelakaan). Kebocoran juga turun menjadi hanya satu insiden di 2013.

Di tahun 2013, untuk pertama kalinya, BP telah mengirimkan kargo LNG dari Tangguh kepada konsumen domestik. Tangguh memasok lima kargo LNG untuk produsen pupuk, PT Pupuk Iskandar Muda (PIM), melalui Kesepakatan Substitusi Kargo dengan kilang LNG Arun. Tangguh juga mulai memasok gas kepada terminal gas terapung (Floating Storage and Regasification Unit-FSRU) baru di Jawa Barat yang dioperasikan oleh PT Nusantara Regas. Saat ini, negosiasi untuk memasok tambahan kargo untuk FSRU tersebut dari Kilang 1 dan 2 untuk beberapa tahun mendatang guna mendukung penjualan gas di Jawa Barat tengah berjalan.

⁶ Lihat bagian XI di bawah untuk informasi lebih lanjut.

Penjualan domestik ini dapat dilakukan karena adanya ketentuan pengalihan dalam kesepakatan penjualan dengan Sempra. Selain bermanfaat bagi Indonesia yang tengah mencari pasokan gas untuk mengurangi ketergantungannya pada minyak, penjualan tersebut juga menjawab kritik politis yang menuduh bahwa Tangguh hanya menguntungkan kepentingan asing.

Kilang LNG di Provinsi Papua Barat berada di lokasi terpencil dan hanya dapat diakses dengan menggunakan perahu. Dua kampung yang terkena dampak pemukiman kembali (“RAV”), Tanah Merah Baru dan Saengga,⁷ berjarak beberapa kilometer dari kilang. Kota terdekat – Bintuni di pesisir utara dan Babo di selatan – masing-masing berjarak dua jam perjalanan dengan perahu dari lokasi kilang. Kampung pesisir utara terdekat berjarak 30 kilometer di seberang Teluk; sekitar satu setengah jam dengan menggunakan perahu cepat. Luas areal kilang kurang lebih sekitar 404 hektar, dengan dikelilingi hutan lindung seluas 2.862 hektar. Gas suar bakar kilang terlihat dari berbagai penjuru Teluk. Dua dermaga, salah satunya sebagai tempat berlabuh kapal tanker, membentang satu kilometer sepanjang pesisir. Zona eksklusi laut di sekitar dermaga tersebut menghambat pergerakan nelayan lokal dari kampung pemukiman kembali. Dua anjungan lepas pantai mengekstraksi gas dari 15 sumur dan mengalirkannya ke pesisir tanpa mengganggu kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan komersial lain.

Pada bulan Maret 2014, terdapat 2.657 karyawan yang bekerja di kilang LNG, 490 di antaranya merupakan karyawan BP dan sisanya merupakan pegawai kontrak. Sebagian besar karyawan berbagi pekerjaan dengan pekerja “*back-to-back*” nya. Sekitar 54% pekerja, termasuk yang dipekerjakan kontraktor, adalah penduduk Papua. Mayoritas berasal dari kampung yang terkena dampak langsung (“DAV”) dan daerah lain di wilayah Kepala Burung di Papua Barat. Persentase ini tetap sama sejak tahun 2011.⁸ BP berkomitmen untuk meningkatkan persentase penduduk Papua menjadi 85% di tahun 2029.

⁷ Sembilan kampung dekat kilang LNG disebutkan dalam AMDAL sebagai Kampung Yang Terkena Dampak Langsung (“DAV”) serta menjadi target program dan penerima dana khusus. Kampung Tanah Merah (lokasi kilang), Saengga (yang menyediakan lahan tempat pemukiman kembali sebagian besar warga kampung Tanah Merah) dan Onar (tempat pemukiman kembali bagi penduduk Tanah Merah yang lain) juga dikategorikan sebagai Kampung Yang Terkena Dampak Pemukiman Kembali (“RAV”) yang diatur oleh Rencana Kerja Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali (“LARAP”) dan AMDAL. LARAP berakhir tahun 2009 dan RAV dimasukkan ke dalam program-program lanjutan sama seperti DAV.

Kegiatan operasional Proyek paling berdampak langsung pada pekampungan di dekat kilang (dalam radius 30-40 kilometer) (DAV) dan perkampungan pemukiman kembali yaitu, Tanah Merah Baru, Saengga dan Onar. Semua kampung DAV dekat kilang telah mengalami peningkatan populasi (sebagian besarnya bukan penduduk asli) dan pertumbuhan kegiatan ekonomi, termasuk pertumbuhan pendapatan per kapita.⁹ Meski demikian, beberapa kampung DAV, terutama di pesisir selatan, tumbuh lebih pesat dan mendapat bantuan lebih banyak dibanding yang lain, dan ini menimbulkan ketegangan yang berkepanjangan. Hal ini akan dibahas lebih detail di bagian VI(B) di bawah. Semua kampung DAV memiliki fasilitas dan layanan kesehatan dan pendidikan yang lebih baik, sistem pengumpulan air bersih baru, pekerjaan di kilang LNG Tangguh bagi para pemuda dan pemudi, serta program mata pencaharian untuk mendiversifikasi serta meningkatkan sumber pendapatan mereka. Tak lama lagi, semua kampung DAV, dan juga Kota Bintuni, akan mendapat penerangan berkat listrik yang dihasilkan di Tangguh.¹⁰

Kegiatan ekonomi dan populasi di Kabupaten Teluk Bintuni terus meningkat. Sebagian besarnya disebabkan oleh migrasi masuk orang non-Papua dari wilayah Indonesia Timur yang lain dan Jawa. Sebagian lainnya disebabkan oleh adanya perusahaan asing berlisensi lain yang beroperasi di wilayah tersebut, termasuk operasi penangkapan ikan komersial dan penebangan kayu non-pribumi serta beberapa perusahaan migas lainnya. Salah satu perusahaan yang ada, Genting Oil, tengah mengembangkan sumber daya gas dalam perimeter kilang LNG. Berkat semua pertumbuhan ini, berbagai proposal telah diajukan ke DPR untuk membentuk beberapa kabupaten baru di Teluk Bintuni.

Pertumbuhan ini terpusat di ibu kota Bintuni yang populasinya telah meningkat lebih dari dua kali lipat sejak resmi menjadi kabupaten di tahun 2004 dan banyak terlihat konstruksi dan pembangunan, terutama sebuah rumah sakit modern dan kompleks kantor pemerintahan di pinggir kota. Perkembangan yang paling signifikan adalah Kota Bintuni kini telah dialiri listrik permanen oleh PLN sejak Februari 2014 dengan menggunakan listrik yang dihasilkan di Tangguh dan ditransfer ke PLN di kilang. Sebelumnya, listrik yang dihasilkan generator diesel sering terputus, tidak merata

Ada empat definisi dan begitu banyak kontroversi mengenai “penduduk Papua”. Definisi-definisi tersebut akan dijabarkan di bagian VII di bawah. Sebanyak 54% perekrutan penduduk Papua didasarkan pada definisi paling luas. Hanya 59% dari pekerja Papua yang berasal dari etnis Papua.

⁸ Lihat Apendiks III untuk data dari “Sensus dan Survei Sosial Ekonomi di Kabupaten Teluk Bintuni 2013,” Universitas Gadjah Mada, 2013.

⁹ Lihat bagian VI(C) di bawah.

dan mahal, sama seperti di kawasan berpenduduk lain di Teluk Bintuni. Satu-satunya rumah sakit yang baru dibangun di Kabupaten Teluk Bintuni telah berfungsi dengan baik. Meski hanya dapat memberikan perawatan kesehatan utama, kemampuan rumah sakit tersebut telah berkembang berkat dukungan BP. Pada saat ini telah tersedia penerbangan komersial dalam provinsi menuju bandara Teluk Bintuni. Bupati Alfons Manibui dan Wakilnya menjabat untuk kedua kalinya, dan akan menjadi yang terakhir, untuk periode lima tahun hingga November 2015.

Babo telah mengalami pertumbuhan kegiatan ekonomi yang signifikan sebagai pusat suplai dan pangkalan Tangguh saat konstruksi awal. Belakangan ini Babo tidak mengalami pertumbuhan pesat meski masih memiliki fasilitas maritim dan landasan udara yang dibangun BP dan akan digunakan dalam konstruksi. Namun, Babo belum memiliki punya jaringan listrik PLN, jalanan untuk pemasaran barangnya kurang, serta kapasitas perawatan kesehatannya yang minim.

Manokwari, sebagai ibu kota Provinsi Papua Barat sejak tahun 2004, juga terus berkembang, meski tak terkait langsung dengan Tangguh. Terdapat sejumlah kegiatan ekonomi dan pembangunan, baik yang dijalankan oleh Pemerintah dan swasta, berasal dari aliran dana Otonomi Khusus. Meski demikian, hanya ada listrik mahal berbasis diesel dan, terlepas dari peningkatan kualitas jalan, perjalanan dari Bintuni ke Manokwari memakan waktu selama enam jam. Gubernur Bram Atururi kini menjabat untuk, untuk periode lima tahun, kedua kalinya hingga November 2016.

Jayapura, sebagai ibu kota propinsi Papua sejak dulu dan kini ibu kota Provinsi Papua (sekitar dua pertiga Papua terdahulu), juga mengalami pertumbuhan signifikan berkat dana

Otonomi Khusus, tapi terus didera ketegangan politik yang cukup serius. Jayapura tidak terlibat langsung dengan sebagian besar urusan Tangguh sejak pemekaran provinsi di tahun 2004, meski demikian, Pangdam dan Kapolda di Jayapura tetap berwenang atas keamanan di kedua provinsi, termasuk Tangguh. Tak hanya itu, terlepas seruan pemimpin daerah untuk meningkatkan pariwisata dan investasi lain, orang asing umumnya tidak diizinkan mengunjungi wilayah Papua mana pun tanpa surat keterangan jalan (“SKJ”). Proses permohonan SKJ cukup sulit dan hanya diberikan untuk perjalanan dinas resmi. Karena itulah kehadiran LSM, pelajar, media dan turis asing sangat langka, bahkan di Jayapura sekalipun.

Di tingkat nasional, para Menteri dan pejabat Pemerintah Indonesia tingkat atas umumnya puas dengan Tangguh, tapi hanya sedikit yang tahu manfaat Tangguh bagi warga Papua, kecuali SKKMigas (regulator hulu). Perhatian mereka kini tertuju pada pengembangan Tangguh, misalnya siapa yang akan mendapat pasokan LNG dari Kilang 3 yang dialokasikan untuk konsumen domestik; serta pada renegotiasi kontrak LNG dengan Fujian yang umumnya dianggap tidak adil bagi Indonesia. Ada optimisme bahwa pengembangan Tangguh akan membantu proses elektrifikasi di wilayah itu dan ada harapan bahwa pengembangan ini akan merangsang pembangunan ekonomi lebih lanjut dan stabilitas di Papua. Meski Program Pengamanan Terpadu Berbasis Masyarakat (“ICBS”) tidak terlalu dikenal, ada kelegaan bahwa ICBS berfungsi efektif dan tak ada masalah keamanan atau hak asasi manusia terjadi di Tangguh.

III. Proposal Pengembangan Tangguh dan AMDAL Baru

Setelah bertahun-tahun melaksanakan eksplorasi, pengembangan proyek dan analisis pasar, BP memulai pengembangan Tangguh untuk membangun kilang ketiga yang akan meningkatkan

produksi sebesar 50%. Jika proses perizinan pemerintah dan persetujuan BP berjalan sesuai rencana, konstruksi akan dimulai pada tahun 2015 dan berlangsung hingga peresmian kilang ketiga di tahun 2019. Meski pengembangan fasilitas di darat (*onshore*) tidak diperlukan (lahan telah dibuka untuk mengakomodasi hingga delapan kilang), dermaga tambahan akan dibutuhkan, dua anjungan baru, serta pipa bawah laut akan dibangun dan 16 sumur baru akan dibor. Karena pembangunan pasca-2019 untuk kilang 3 atau kemungkinan kilang 4 yang mencakup anjungan dan beberapa sumur di Kabupaten Fakfak (di sebelah barat Kabupaten Teluk Bintuni), AMDAL baru memperluas yurisdiksi lokal yang akan terkena dampak langsung. Konstruksi akan membutuhkan sekitar 7.500 pekerja baru yang mengharuskan pembukaan lahan dan pembangunan kamp baru. Konstruksi juga harus berjalan paralel, baik di darat maupun lepas pantai, dengan kegiatan operasional kilang 1 dan 2.

Pengembangan membutuhkan beberapa persetujuan dari pemerintah, termasuk rencana untuk pengembangan kilang dan pemasaran LNG, AMDAL baru, dan rencana pembiayaan. Rencana Pengembangan Lanjutan (“POFD”) telah disetujui oleh BPMigas (regulator hulu pada saat itu) di bulan November 2012. POFD mengharuskan BP menjual minimal 40% dari produksi kilang 3 kepada konsumen domestik. Di awal pengembangan Tangguh, tak ada ketentuan yang mengharuskan penjualan ke konsumen domestik dan hal ini mendapat kritikan dari beberapa pihak.

Persetujuan terhadap AMDAL baru, yang menetapkan komitmen sosial dan lingkungan BP, membutuhkan dukungan Pemerintah Kabupaten dan Provinsi. Pada bulan Februari, Gubernur Papua Barat, Bupati Teluk Bintuni dan Fakfak, serta pemimpin adat setempat telah memberikan dukungan terhadap AMDAL baru setelah proses konsultasi publik dan dengar pendapat yang ekstensif. Panjangnya proses tersebut merupakan rekor untuk proyek sejenis ini di Indonesia. TIAP diberi tahu bahwa setelah berkonsultasi dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Menteri Keuangan, Menteri Lingkungan Hidup kemungkinan akan memberikan persetujuan terakhir.

AMDAL baru menambahkan berbagai komitmen baru selain komitmen lama yang dimuat di AMDAL pertama dan dijelaskan di laporan sebelumnya.¹¹ Dukungan para pemimpin

setempat terhadap AMDAL sangat bergantung pada komitmen baru ini, yang beberapa di antaranya amat penting. Pertama, AMDAL menambahkan Proyek Pemukiman Pesisir Pantai Utara baru guna meningkatkan kualitas pemukiman dan infrastruktur di beberapa kampung di pesisir pantai utara.¹² TIAP telah merekomendasikan program tersebut sejak beberapa tahun lalu, dan mendorong pembentukan Yayasan Pengembangan Teluk Bintuni yang didirikan untuk tujuan ini, tapi gagal mencapai tujuannya.¹³

Kedua, AMDAL mengakomodasi elektrifikasi lebih lanjut di wilayah Teluk Bintuni dengan menggunakan listrik yang dihasilkan di Tangguh dan didistribusikan oleh PLN. Saat ini hanya Kota Bintuni yang dialiri listrik dari Tangguh. BP berkomitmen menyediakan listrik bagi semua kampung DAV dan Kota Babo. Berbagai tantangan yang ditemui dalam usaha ini dibahas di bagian VI.

Ketiga, AMDAL mewajibkan program gas untuk listrik bagi Provinsi Papua Barat yang memungkinkan populasi di wilayah pesisir pantai di provinsi itu untuk menghasilkan listrik yang terjangkau baik melalui pipa gas atau LNG dari Tangguh. BP berkomitmen untuk mengalokasikan 15mmcf per hari, cukup untuk menghasilkan daya sekitar 50 sampai 80MW, untuk tujuan ini. Upaya ini juga menemui berbagai tantangan yang dibahas di bagian XII.

Selain tiga proyek khusus tersebut, AMDAL baru juga akan memperluas fokus program sosial Tangguh di luar kampung DAV untuk mencakup empat kelompok suku asli yang bermukim di wilayah pesisir pantai dekat lokasi kilang.¹⁴ Hal ini juga akan membutuhkan pembentukan pusat-pusat Diversifikasi Strategi Pertumbuhan baru di Babo dan Bintuni; dan dengan demikian maka Rencana Bersama Masyarakat (“PBM/ CAPs”) untuk kampung DAV tidak akan dilanjutkan, yang telah menyediakan kontrak pengelolaan dana sebesar \$30,000 per tahun untuk memenuhi kebutuhan tertentu setiap kampung DAVs. Meski terpisah dari AMDAL, Bupati cemas konstruksi kilang 3 akan mengurangi aliran pendapatan ke kabupaten. Bahkan, aliran pendapatan dari Tangguh ke Kabupaten Teluk Bintuni mungkin dapat berkurang selama masa konstruksi karena mekanisme pembiayaan pengembangan tersebut. Untuk menghindarinya, BP juga bertekad “melindungi” tingkat pendapatan bagi kabupaten. Tujuan ini telah disetujui oleh SKKMigas selaku regulator hulu.¹⁵

¹¹ Lihat, antara lain, Laporan TIAP Maret 2007 halaman 15-17 untuk pembahasan persyaratan AMDAL mengenai ketenagakerjaan Papua dan halaman 35-39 yang menjelaskan persyaratan lingkungan.

¹² Hal ini dibahas lebih detail di bagian VI(B) di bawah.

¹³ Lihat Laporan Panel Tahun 2012 mengenai Fase Operasional halaman 47-48.

¹⁴ Ini melibatkan populasi sekitar 20.000 jiwa. Peta wilayah suku dicantumkan sebagai bagian Apendiks I.

Terakhir dan yang paling penting, dukungan lokal untuk AMDAL dilandaskan pada kesepakatan antara pemangku kepentingan lokal, termasuk Gubernur, dua Bupati, dan pemimpin adat terkait penerbitan Perdasus DBH untuk mengalokasikan pendapatan sumber daya alam yang dihasilkan perusahaan minyak dan gas, termasuk Tangguh. Perdasus ini dinamakan “Peraturan Daerah Khusus Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi” (Perdasus DBH). Kesepakatan ini telah dicapai dan masih menunggu persetujuan dari Pemerintah Indonesia. Kesepakatan ini memakan waktu hingga bertahun-tahun dan menyebabkan banyak kontroversi. Perdasus DBH terkait 40% pendapatan Tangguh setelah dipotong pajak yang mengalir ke Pemerintah Daerah tapi belum dialokasikan oleh formula. Berdasarkan kesepakatan ini, pendapatan 40% itu akan dibagi dua: separuhnya (atau 20%) akan dibagi 4% untuk Provinsi, 7% untuk Kabupaten Teluk Bintuni, 7% untuk semua kabupaten lain di provinsi; dan 2% untuk pendidikan lanjutan di provinsi. Sisanya (20%) akan dibagi antara dana perwalian yang dikelola pemimpin adat; dan dana untuk pengembangan masyarakat setempat.¹⁶

Sebagai hasil komitmen ini, pengembangan Proyek mendapat dukungan kuat, meski tidak bulat, dari penduduk asli dan pejabat pemerintah. Bupati dan sejumlah pemimpin lokal lain puas atas cara BP bekerja sama dengan mereka untuk mencapai kesepakatan ini, dan menyediakan pekerjaan bagi masyarakat Papua serta meningkatkan layanan lokal. Meski demikian, masih ada kritik serius terkait beberapa isu yang dapat BP tangani, termasuk perlakuan tak setara terhadap kampung-kampung pesisir pantai utara, ketenagakerjaan dan pengembangan masyarakat Papua, elektrifikasi, dan hambatan lahan perikanan; serta isu-isu yang harus ditangani Pemerintah Daerah, misalnya pengakuan adat terhadap klaim kepemilikan tanah adat dan sumber daya.¹⁷

¹⁵ Lihat bagian X di bawah. Tujuan ini akan dicapai oleh BP dengan menunda pengembalian atas pajak pertambahan nilai (“VAT”) yang seharusnya berhak diambil BP. Pada saat kunjungan TIAP, Kementerian Keuangan tengah menyiapkan “simulasi” aliran pendapatan menggunakan mekanisme pembiayaan alternatif.

Proses AMDAL baru menyediakan peluang terbaik untuk mendapat masukan dan menjalin dialog dengan pihak-pihak lokal yang terkena dampak langsung. Kegiatan ini mengukur pandangan masyarakat terhadap dampak program-program sosial dan lingkungan Tangguh yang telah dilaksanakan dan menimbulkan perasaan masyarakat setempat terhadap Tangguh. AMDAL pertama juga didasarkan pada masukan masyarakat, tapi tentunya disusun sebelum konstruksi dimulai dan tanpa masukan dari Pemerintah Daerah yang baru dibentuk. Pengalaman konstituen lokal selama 10 tahun terakhir memberi mereka pemahaman nyata dan spesifik mengenai apa yang efektif dan tidak, serta program mana yang harus dihentikan dan mana yang harus diubah. Berkat sifat kolaboratifnya, BP telah menerima banyak saran dan masukan saat membentuk manajemen sosial menjadi Program Pembangunan Keberlanjutan Tangguh (“TSDP”) yang baru dan akan menggantikan Program Sosial Terpadu (“ISP”).

¹⁶ Lihat bagian X di bawah untuk pembahasan detail mengenai implikasi kesepakatan ini dan Apendiks IV untuk tabel alokasi pendapatan Tangguh.

¹⁷ Pemimpin lokal dan suku selalu menekankan bahwa kompensasi adat harus sebesar Rp60 miliar, tapi yang baru dibayar hanya Rp6 miliar. Banyak pihak berharap isu ini dapat diselesaikan melalui Perdasus, tapi beberapa pihak berharap BP dapat membantu mendanai klaim ini. Lihat bagian X(B) di bawah untuk pembahasan lebih lanjut.

Pertama, AMDAL baru mengalihkan fokus pengembangannya dari DAV ke “pengembangan yang berkelanjutan untuk Masyarakat Asli, karena itu tidak lagi menggunakan pendekatan DAV.” Kebijakan BP untuk “memprioritaskan, memberdayakan dan memperkuat Masyarakat Asli akan melandasi seluruh program sosial LNG Tangguh.”¹⁸ Peralihan ini juga dikarenakan migran yang pindah ke Teluk Bintuni turut menikmati bantuan yang awalnya ditujukan bagi Masyarakat Asli. TIAP mendukung perluasan fokus program sosial ini. Selain itu, dengan mengikutsertakan semua suku asli yang bermukim di wilayah tersebut, kecemburuan antara beberapa kampung dan kelompok di sana dapat diredakan.

Meski demikian, jelas bahwa penduduk yang tinggal di beberapa kampung DAV pesisir adalah yang paling terkena dampak langsung dibandingkan penduduk di wilayah lain, terlepas dari apakah mereka penduduk asli atau bukan. Mereka tinggal di dekat kilang dan kilang telah mempengaruhi lingkungan dan mata pencaharian mereka secara langsung. Sama seperti kampung RAV yang disediakan pemukiman baru, fasilitas umum, elektrifikasi dan bantuan khusus lain karena kondisi istimewa mereka, kampung DAV juga membutuhkan pengakuan dan kompensasi melebihi kampung lain di wilayah tersebut. Dan tentunya pada saat ini, meski ada migran tinggal di kampung DAV, mayoritas populasi di kampung-kampung ini adalah penduduk asli Papua.¹⁹ Pengakuan khusus untuk kampung-kampung ini harus dilanjutkan. Sampai saat ini, CAP/ PBM, yang merupakan kontrak pengelolaan dana sebesar \$30,000 per tahun untuk setiap kampung DAV, berhasil menyediakan bantuan-bantuan tersebut. CAP/ PBM juga membantu meningkatkan tata kelola dan anggaran kampung.²⁰ Meski CAP/ PBM akan dihentikan, BP harus mendorong alokasi dana pengembangan yang tersedia bagi kampung-kampung ini untuk proyek-proyek pengelolaan.

¹⁸ Lihat Rangkuman Manajemen Sosial LNG di halaman 4.

¹⁹ Sensus UGM memperkirakan 73% penduduk DAV adalah orang Papua, 52% di antaranya dari suku asli. Selain empat DAV, semua DAV hampir semuanya dihuni masyarakat adat. Lihat bagian VI(F) di bawah.

²⁰ AMDAL baru secara spesifik mengakui kebutuhan ini: “Isu paling fundamental yang memengaruhi peluang masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya adalah ketidakmampuan masyarakat memainkan peran aktif dalam mendorong pembangunan di kampung mereka. LNG Tangguh percaya bahwa dengan membantu masyarakat mengelola pembangunan di

Kedua, AMDAL baru terbit pada saat yang tepat untuk mengevaluasi komitmen awal di tahun 2004 dan revisi ISP tahun 2009. Periode lima tahun adalah jangka waktu yang tepat untuk mengimplementasi sebuah program, mengevaluasi efektivitasnya, dan membuat perbaikan. TIAP bahkan menyarankan semua program ditinjau sepenuhnya setiap lima tahun, dan analisis berikutnya dilakukan pada tahun 2019 (atau lebih dini bila ada hasil yang kurang).

Ketiga, banyak komitmen AMDAL baru yang bertingkat tinggi dan aspiratif, dan bukan kuantitatif atau spesifik pada program tertentu. Meski cakupan geografisnya lebih luas, sebagian besar tujuannya mirip dengan program terdahulu. Sebagai hasilnya, elemen spesifik dari implementasi jangka panjang akan jadi hal paling penting. BP harus mencari mitra-mitra terbaik dan memberikan dukungan konsisten bagi program-program tersebut sepanjang masa operasionalnya untuk mencapai tujuan ambisius mereka. Selain itu, sebagian besar program memiliki nama dan singkatan baru. Pembentukan kembali dan reorganisasi program-program sebelumnya membingungkan penerimanya dan pemangku kepentingan lain, serta harus dihindari jika memungkinkan. Revisi atau perubahan program dapat dilakukan tanpa menghapus program itu. Jika program dibatalkan atau diganti, alasannya harus dijelaskan agar tak ada implikasi bahwa program itu gagal mencapai tujuannya. Pihak yang berjasa di balik keberhasilan program sebelumnya harus diakui, sementara perubahan untuk meningkatkan kinerja terus dilakukan.

Keempat, pengembangan lingkup geografis program sosial Tangguh kini akan mencakup wilayah tambahan di Kabupaten Fakfak. Hal ini karena sumur produksi baru bisa jadi akan dibangun di kabupaten tersebut dalam pengembangan di masa depan. BP telah menghadapi banyak tantangan dalam bekerja sama dengan Kabupaten Teluk Bintuni selama periode AMDAL pertama. Hal ini disebabkan karena kabupaten itu baru dibentuk tahun 2004. Meski demikian, melipatgandakan jumlah

kampung mereka dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat akan menciptakan pola hubungan eksternal yang harmonis ...” Ringkasan Manajemen Sosial LNG Tangguh halaman 47.

kabupaten yang memfasilitasi pelaksanaan program mengharuskan kegiatan hubungan pemerintah yang lebih intensif dan akan memunculkan banyak tantangan baru. Hingga saat ini TIAP belum berkonsultasi dengan pejabat Fakfak. Personel hubungan eksternal BP harus mengalokasikan sumber daya untuk yurisdiksi baru ini dan Pemerintah Daerahnya. Karena keharusan mendapatkan persetujuan atau bentuk dukungan lain dari Pemerintah Kabupaten Fakfak, program-program tak boleh terhambat atau berlarut-larut di Kabupaten Teluk Bintuni.

IV. Perkembangan Kondisi Politik dan Keamanan

Ada semangat nasionalisme besar di Indonesia, termasuk antagonisme terhadap investasi asing di sektor sumber daya alam serta antusiasme terhadap peningkatan peran badan usaha milik negara dan daerah. Ini adalah tahun pemilu dan mungkin beberapa retorika itu bersifat politis dan takkan menjadi kebijakan. Tapi hampir setiap kandidat presiden, bahkan yang dulu paling mendukung perdagangan internasional dan investasi asing, menyuarakan tema nasionalisme sumber daya alam yang mengkritik *status quo* pengembangan sumber daya. Hal itu sangat mengancam ekstensi kontrak yang ada sekarang dan investasi di masa depan yang belum dilindungi kesepakatan formal. Sayangnya, isu utama terkait Tangguh yang menjadi sorotan nasional berkontribusi terhadap antagonisme ini: pertama, Tangguh menyebabkan kerugian bagi Indonesia karena harga LNG untuk Cina sangat rendah; dan kedua, seluruh produksi Tangguh (hingga baru-baru ini) telah diekspor. Oleh karena itu, semua isu terkait pengembangan harus dipandang melalui prisma politik ini.

Pergeseran menuju nasionalisme sumber daya alam ini tercermin jelas dari beberapa kebijakan dan peristiwa. Pertama, di bulan November 2012, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa regulator hulu, BPMigas, sebagai badan inkonstitusional dan membubarkannya. Gugatan tersebut diajukan oleh salah satu kelompok muslim terbesar Indonesia, Muhammadiyah (bersama organisasi Islam lain) dan berlandaskan premis bahwa BPMigas bergerak sendiri di luar pemerintahan terpilih dan sangat menguntungkan perusahaan asing.

Meski BPMigas ‘untuk sementara’ dibentuk kembali sebagai SKKMigas di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, isu mendasarnya masih akan ditentukan oleh UU minyak dan gas baru yang tengah dipertimbangkan DPR dan kemungkinan besar akan mencerminkan pandangan yang dianut masyarakat luas ini.

Kedua, kampanye antikorupsi Indonesia, yang sangat berhasil di bawah kepemimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (“KPK”), juga menciduk beberapa pihak tak bersalah yang terkait dengan kepentingan asing. Dalam kasus yang diungkap bukan oleh KPK melainkan oleh Kejaksaan Agung, empat individu yang bekerja untuk perusahaan migas raksasa Chevron Pacific Indonesia (“CPI”) berbasis di AS atau kontraktornya divonis melakukan korupsi yang “menimbulkan kerugian bagi negara” terkait biaya proyek bioremediasi.²¹ Mereka kini tengah menjalani hukuman meski beberapa pejabat negara menyatakan bahwa hukuman tersebut tanpa dukungan fakta. Tak hanya itu, Presiden ExxonMobil Indonesia tak diberikan ekstensi untuk kontrak kerja satu tahunnya dan ExxonMobil diminta untuk menggantikannya.²²

Tekanan untuk menasionalisasi produksi energi hulu (yang baru saja dilepaskan dari kendali negara melalui Undang-Undang Minyak dan Gas Tahun 2002) diilustrasikan oleh pernyataan dan tindakan Kementerian ESDM terkait ekstensi kontrak kerja sama (“PSCs”) yang ada sekarang. Dalam beberapa kasus yang menonjol, operator PSC yang meminta ekstensi hanya mendapat ketidakpastian atau penolakan. Contohnya, ketidakpastian yang dialami Total E&P Indonesia terkait masa depan blok minyak dan gas Mahakam di Kalimantan Timur membuatnya menghentikan pengembangan proyek barunya di sana.²³

²¹ Secara terpisah, KPK menginvestigasi kontribusi Presiden CPI ke pemerintah daerah Riau. *Lihat* INVESTOR DAILY, REPUBLIKA, KONTAN, Apr. 9, 2013.

²² *Lihat* “RI asks ExxonMobil Indonesia to Replace its President Director,” THE JAKARTA POST, Jan. 2, 2013.

Wakil Menteri ESDM menekankan bahwa pemerintah akan meningkatkan peran perusahaan nasional dan lokal yang seharusnya sanggup bersaing dengan perusahaan asing di sektor minyak dan gas. Dia menambahkan bahwa perusahaan dan teknologi asing kini mendominasi industri hulu minyak dan gas di Indonesia dan regulator (SKKMigas) harus meningkatkan peran perusahaan nasional di industri hulu minyak dan gas. Perusahaan provinsi pun berniat memasuki bisnis minyak dan gas.²⁴

Pengamat independen menyerukan pembubaran SKKMigas dan pengangkatan Pertamina sebagai pengelola semua aset hulu. Salah satu pengamat paling vokal mengkritik BP, “British Petroleum bahkan berani menggunakan cadangan gas alam milik negara sebagai jaminan guna memperluas lapangannya. ...Tugas SKKMigas harus ditransfer ke Pertamina.”²⁵

Antagonisme ini juga tercermin dari kegiatan populis. Mahasiswa Universitas Riau, misalnya, berdemonstrasi di kantor Chevron Pacific Indonesia di Riau, menuntut Pemerintah Pusat untuk menyerahkan pengoperasian blok minyak Siak ke Pemerintah Daerah. Protes itu memuncak dengan mahasiswa membakar ban dan merobohkan pagar besi setinggi lima meter di pangkalan Rumbai milik Chevron.²⁶

Keadaan diperkeruh oleh kepala SKKMigas, Rudi Rubiandini, yang divonis menerima suap dari perusahaan minyak Singapura (Kernel Oil). Kernel memenangkan beberapa tender minyak yang digelar oleh SKKMigas.²⁷ Rubiandini tertangkap tangan menerima \$700,000 dalam bentuk tunai dan divonis tujuh tahun penjara dan denda Rp200 juta.

²³ Beberapa perusahaan minyak dan gas telah meninggalkan Indonesia atau menjual aset mereka termasuk Hess Corp, Anadarko Petroleum, Premier Oil dan Korean National Oil.

²⁴ Lihat BISNIS INDONESIA, KORAN SINDO, Sept. 10, 2013. Provinsi Jawa Barat mendirikan perusahaan milik pemerintah daerah atau BUMD untuk mengelola ladang minyak dan gas barunya secara independen.

²⁵ Lihat pembahasan mengenai media dan urusan publik di bagian VIII di bawah. *Lihat juga* “Kurtubi: Minyak dan gas Harus Dikelola BUMN,” *Antaraneews.com*, Sept. 13, 2013; *NERACA*, Sept. 16, 2013.

²⁶ *Lihat* “Students Want Local Government to Take Over Siak Block Operations,” *THE JAKARTA POST*, May 8, 2013.

Uang sebesar \$200,000 juga ditemukan dalam brankas Direktur Jenderal ESDM, yang menurut Rubiandini akan diberikan pada anggota DPR komisi energi sebagai tunjangan hari raya.²⁸

Pejabat tingkat tinggi lain mungkin terlibat dalam penyidikan lebih lanjut. Kasus ini kian menguatkan anggapan populer bahwa kepentingan asing telah menyelewengkan peraturan minyak dan gas.

Di Papua, kondisi keamanan telah membaik,²⁹ meski masih ada perbedaan pendapat dan perasaan tak suka terhadap Jakarta. Kekerasan yang dilakukan kelompok separatis OPM menurun drastis, kecuali di Dataran Tinggi Tengah. Kekerasan dekat tambang Freeport juga berlanjut, tapi sulit mengetahui sumbernya. Tak ada kekerasan politik, baik terkait separatis atau tidak, di Teluk Bintuni. Lebih penting lagi, tak ada pelanggaran HAM oleh polisi atau TNI belakangan ini; dan memang Pangdam dan Kapolda cukup peka terhadap masalah HAM serta mempromosikan kebijakan keamanan baru yang menekankan *soft power* dan peningkatan kesejahteraan sosial. Keduanya berupaya meningkatkan partisipasi di masyarakat dan proyek bakti sosial, sebuah model yang digunakan TNI di Freeport. Kedua pejabat itu baru menjabat setelah kunjungan terakhir TIAP dan mengetahui latihan bersama tahunan untuk mengimplementasi ICBS.³⁰

Gubernur Papua yang baru terpilih, Lukas Enembe, dan Gubernur Papua Barat yang terpilih kembali, Bram Atururi, telah membawa kestabilan politik. Keduanya memandang Tangguh secara positif dan ingin menggunakan gas Tangguh untuk menghasilkan listrik di provinsi mereka. Gubernur Atururi menyatakan dukungannya untuk kesepakatan AMDAL baru, terutama pencantuman Fakfak dalam program sosial, dan rencana Tangguh untuk

²⁷ Lihat "Kernel Executive Sentenced to Three Years for Bribing Rudi," THE JAKARTA POST, Dec. 20, 2013.

²⁸ Lihat REPUBLIKA, Jan. 28, 2014; KORAN TEMPO, Nov. 12, 2013.

²⁹ Lihat pembahasan kondisi keamanan tahun 2011-2012 di laporan TIAP 2012 halaman 9-14.

³⁰ Lihat bagian V di bawah untuk pembahasan isu-isu ini.

pembangunan, tapi berharap rencana itu mencakup listrik untuk Papua Barat. Dia ingin Tangguh menjadi teladan bagi perusahaan minyak dan gas lain yang beroperasi di Papua.

Gubernur Enembe, yang merupakan anggota Partai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (“SBY”) Partai Demokrat, mengusulkan untuk memodifikasi dan meningkatkan Otonomi Khusus setelah berdiskusi dengan Presiden.³¹ Dia berharap DPR akan mengesahkan “Otonomi Khusus Plus” atau Otsus Plus, sebelum akhir masa jabatan SBY di bulan November. Ini akan menjadi usaha ketiga SBY untuk mengatasi ketidakpuasan di Papua atas implementasi Otonomi Khusus.³² Banyak yang yakin besarnya aliran dana ke provinsi-provinsi itu tak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, melainkan dialihkan ke elite dan lenyap akibat korupsi. Bahkan, seluruh 44 anggota dan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“DPRD”) Papua Barat divonis menerima suap dalam kasus yang diangkat Kejaksaan Negeri Jayapura.³³ Proses bandingnya kini tengah berjalan.

Upaya meningkatkan Otonomi Khusus memicu perdebatan panas tentang apakah menyelamatkan UU yang pertama atau memperbaikinya. Sejauh ini perdebatan itu tidak menimbulkan kekerasan. Tiap gubernur memiliki ide yang sangat berlainan meski rancangan yang didukung keduanya telah diajukan.³⁴ Modifikasi umumnya terkait peningkatan kewenangan kedua provinsi, dana bagi hasil yang lebih besar, dan tindakan afirmatif

³¹ Undang-Undang Otonomi Khusus No. 21 Tahun 2001 mewakili landasan politik/ekonomi yang mendukung stabilitas di Papua; UU ini memberi manfaat politik dan ekonomi yang unik pada Papua sebagai mekanisme untuk meredakan sentimen separatis dan meningkatkan indikator kesejahteraan ekonomi dan sosial. Otonomi Khusus atau dikenal sebagai Otsus di Papua, menyediakan pendanaan tambahan untuk program provinsi dan kabupaten, sekaligus bentuk penghormatan bagi warisan budaya Papua yang unik. Arus pendapatan sangat besar kini mengalir ke Papua, pembahasan detailnya di bagian X di bawah, tapi manfaat pendapatan ini tak diterima secara merata oleh semua penduduk Papua, dan banyak yang merasa bahwa penghormatan unik dan kultural yang dijanjikan bagi Papua telah diabaikan.

³² SBY mengusulkan “Kesepakatan Baru untuk Papua,” di tahun 2007 untuk mempercepat pembangunan, meningkatkan layanan sosial, dan memberikan tindakan afirmatif bagi penduduk Papua. Di tahun 2011, pemerintahan SBY kembali berupaya meningkatkan implementasi Otonomi Khusus, menjangkau penduduk Papua dan meredakan konflik dengan mendirikan Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (“UP4B”) di bulan September 2011. Unit ini dikepalai Letnan Jenderal (Purn) Bambang Darmono. UP4B difokuskan pada pembangunan infrastruktur dan ekonomi seperti jalanan dan bandara baru, serta membantu PLN memberikan layanan listrik bagi Bintuni.

³³ Lihat “Gantikan Semua Anggota Dewan di Papua Barat,” MEDIA INDONESIA (TAJUK UTAMA), Feb. 12, 2014.

³⁴ “OTSUS PLUS: The debate Over Enhanced Special Autonomy for Papua,” Institute for Policy Analysis of Conflict, Nov. 25, 2013.

lebih baik bagi masyarakat adat Papua, termasuk membatasi migrasi masuk. Kemungkinan besar tak ada yang disahkan dalam waktu dekat. Beberapa perubahan yang diusulkan akan memengaruhi Tangguh secara langsung karena Tangguh telah menjalankan tindakan afirmatif yang diwajibkan oleh hukum.

V. Keamanan dan Hak Asasi Manusia di Tangguh

Agar Tangguh dapat menjadi model pembangunan kelas dunia, kehadirannya tak boleh menjadi sumber konflik dan kekerasan di Teluk Bintuni. Tiap konflik yang terjadi harus diselesaikan dengan damai. Demi mencapai tujuan ini, BP telah merancang dan menerapkan ICBS untuk memberikan pengamanan yang efektif dan mengurangi kemungkinan konfrontasi antara masyarakat asli dan personel keamanan. ICBS Tangguh yang merupakan konsep unik dan belum teruji di Indonesia hingga kini terbukti efektif. Lingkaran keamanan bagian dalam dikawal oleh personel keamanan swasta, semuanya penduduk Papua, kebanyakan berasal dari daerah setempat. Hal ini memberikan karakteristik lokal pada kegiatan keamanan sehari-hari, menyediakan lapangan kerja bagi pemuda dan pemudi lokal serta memberi kampung-kampung setempat koneksi ke Tangguh dan rasa persaudaraan dengan personel keamanan. Polisi akan dipanggil hanya untuk menegakkan hukum atau keadaan darurat yang tak bisa ditangani keamanan swasta. TNI hanya akan dipanggil bila keamanan swasta dan polisi tak mampu mengendalikan situasi. Pejabat keamanan mendorong perusahaan lain untuk mengadopsi model keamanan serupa.

Terlepas dari pentingnya ICBS, keamanan Tangguh tak boleh diartikan hanya sebagai integrasi dan pelatihan personel keamanan Tangguh oleh kepolisian dan TNI. Membina dan mempertahankan hubungan baik dengan masyarakat melalui program sosial yang bermanfaat dan menciptakan nuansa kemitraan dan kepemilikan di kalangan masyarakat juga penting bagi

keamanan Tangguh. Ini harus terus menjadi elemen keamanan yang penting.

Kesepakatan utama yang mengatur ICBS adalah Petunjuk Lapangan Pengamanan Bersama, JUKLAP-PAMBERS, yaitu kesepakatan antara BP dan Kepolisian Papua yang menjelaskan tanggung jawab, pelatihan, dan respons tepat untuk ancaman dan kecelakaan.³⁵

Kesepakatan yang dibuat tahun 2004 dan diperbarui serta diperluas tahun 2009 itu akan berakhir tahun 2014. Kesepakatan itu menjabarkan latihan tahunan bersama, pelatihan HAM bagi polisi, dan pemicu yang dibutuhkan sebelum melibatkan polisi atau TNI. JUKLAP-PAMBERS memuat Prinsip Sukarela PBB dalam hal Keamanan dan Hak Asasi Manusia. Panduan baru ini harus terus menerapkan praktik-praktik tersebut. Tak hanya itu, JUKLAP-PAMBERS harus meningkatkan komunikasi dan dialog antara kepolisian dan masyarakat, agar ICBS dapat disosialisasikan dan dipahami semua pihak. Ini dibutuhkan untuk menangkali potensi meningkatnya ketegangan selama konstruksi, terutama terkait perluasan pembatasan wilayah penangkapan ikan. Semua batasan wilayah penangkapan ikan yang dibutuhkan harus dibahas oleh BP, polisi dan kampung terkait. Jika memungkinkan, jalan keluar alternatif harus ditawarkan.

Elemen fundamental ICBS mengharuskan semua personel keamanan yang akan dipanggil dalam situasi darurat mengikuti pelatihan atau pengenalan Prinsip Sukarela, Prinsip Dasar PBB Mengenai Penggunaan Kekuatan, dan prinsip hak asasi manusia. Kontraktor keamanan BP secara rutin melatih personelnnya mengenai prinsip-prinsip ini dan terutama penggunaan pentungan atau perlengkapan pengendalian massa lain. Tindakan personel keamanan dalam situasi pengendalian massa kemungkinan akan menjadi ujian pertama ICBS dalam situasi darurat. Pelatihan ini tidak dilaksanakan tiap tahun karena personel keamanan dipekerjakan untuk periode lebih lama. TIAP yakin pelatihan ini penting bagi kinerja karena itu harus diberikan pada personel baru sebelum menerima pentungan atau perangkat lain yang dapat menyebabkan cedera serius, dan pelatihan itu harus dilakukan tiap tahun. Persyaratan ini harus dicantumkan dalam kontrak pembaruan personel keamanan yang akan diberikan tahun ini.

³⁵ JUKLAP-PAMBERS dijabarkan lebih detail di laporan TIAP November 2012 halaman 13-14, 17-18.

Kepolisian melakukan latihan ini setiap tahun, sebagaimana yang diwajibkan oleh JUKLAP-PAMBERS. Hingga saat ini, TNI juga telah dengan sukarela menerima latihan tersebut bagi pasukannya yang akan dipanggil untuk kondisi darurat di Tangguh. BP harus bekerja sama dengan semua Pangdam agar hal ini dapat berlanjut. Pendidikan dan penekanan prinsip-prinsip ICBS kepada personel keamanan masyarakat harus terus dilakukan.

Elemen penting ICBS yang kedua adalah latihan tahunan bersama. Latihan ini melibatkan BP, personel keamanan swastanya, dan kepolisian Papua. TNI dan LSM lokal juga kini hadir sebagai pengamat; begitu pula Pemerintah dan media lokal. Efektivitas ICBS bergantung pada pemahaman prinsip-prinsipnya oleh semua personel keamanan di wilayah tersebut, serta pemahaman masyarakat. Hal ini penting karena sampai saat ini, ICBS bukan hal lazim bagi institusi-institusi tersebut. Dalam beberapa kunjungan sebelumnya, TIAP bertemu Pangdam dan Kapolda yang tak familiar dengan latihan bersama ini, yang tidak dilaksanakan pada tahun 2011. Tahun ini keduanya mengetahui dan merasa latihan itu sangat berguna.

Tapi ada beberapa saran peningkatan yang dapat diterapkan. Salah satu aparat keamanan menyatakan bahwa latihan bersama harus lebih realistis. TIAP mendukung saran ini dan merekomendasikan agar setiap tahun BP bekerja sama dengan kepolisian untuk menyimulasikan ancaman keamanan nyata di mana personel keamanan belum tiba di lokasi. Latihan bersama ini juga tidak boleh digabung dengan bagian program yang lain, misalnya pelatihan HAM. TIAP merekomendasikan kedua elemen ini dipisahkan agar peserta dapat fokus pada satu tujuan. Tahun lalu, latihan bersama juga mencakup Program Tanggung Jawab Sosial Masyarakat di mana polisi, TNI dan BP membersihkan tempat-tempat umum di Babo. TIAP yakin latihan bersama tidak akan efektif kecuali bila kedua program tersebut benar-benar dipisah.

Kepolisian dan TNI menyatakan sangat tertarik untuk berpartisipasi dalam kegiatan bakti sosial masyarakat seperti pembersihan, pengecatan, atau melatih pemuda berolahraga. Kegiatan-kegiatan ini terpuji dan berniat baik; serta dapat dijalankan tanpa bantuan BP. Meski demikian, Panel memandang aksi BP membawa pasukan yang belum dididik itu ke kampung inkonsisten dengan prinsip ICBS. Setidaknya untuk sekarang, TIAP merekomendasikan dukungan BP terhadap kehadiran personel polisi dan TNI di kampung-kampung yang terkena dampak hanya terbatas pada komunikasi dan forum publik yang menginformasikan masyarakat tentang keamanan, HAM dan ICBS. Tak hanya itu, BP tengah mempertimbangkan menggunakan personel keamanan swasta untuk menjalankan kegiatan bakti sosial di kampung asal mereka saat mereka sedang tak bertugas di kilang. Panel mendukung kegiatan ini selama mereka tidak memakai seragam saat melakukan bakti sosial.

Seorang aparat keamanan senior juga menyatakan bahwa seragam personel keamanan swasta menakutkan. Panel juga merasa demikian dan mungkin hal ini memang disengaja meski tak jelas apa memang dibutuhkan ataukah berguna. Kontrak keamanan swasta yang kini berusia empat tahun akan berakhir pada Januari 2015. Saat BP mengadakan tender untuk memperpanjang atau mengganti kontraktor, BP harus meminta masukan mengenai penggantian seragam atau membuat panduan mengenai kapan dan di mana seragam harus digunakan. Misalnya, seragam yang menunjukkan kewenangan mungkin dibutuhkan saat menjaga kilang Tangguh. Meski demikian, di luar kilang Tangguh sebaiknya menggunakan seragam yang lebih nyaman dan tidak mengintimidasi. Personel keamanan juga harus dilibatkan dalam keputusan ini.

Elemen penting lain yang dirancang untuk perlindungan HAM dan memantau pelanggaran adalah sistem pengaduan yang dirancang bagi warga kampung dan karyawan sesuai saran TIAP tahun 2006. Cuma ada 38 keluhan yang disampaikan oleh masyarakat di tahun 2013, jauh lebih rendah dibanding 115 keluhan di tahun 2011. Sebagian besarnya terkait isu tenaga kerja atau pengembangan masyarakat. Beberapa keluhan terkait perahu BP yang menyebabkan kerusakan jaring nelayan lokal dan kompensasinya, telah dibayarkan. Tak ada keluhan terkait HAM, keamanan atau perlakuan buruk. Terdapat beberapa keluhan di tahun 2012 baru

ditanggapi setelah lebih dari 20 hari, waktu yang telah ditentukan program. BP telah mengatasi pelanggaran ini. Meski sistem pengaduan tampak berjalan baik, BP harus memastikan bahwa sistem ini dipahami oleh penduduk kampung dan karyawan, dan bahwa mereka mampu dan merasa nyaman untuk membuat pengaduan. Oleh karena itu, staf urusan masyarakat harus menggelar forum rutin yang agendanya mencakup sistem pengaduan, dan staf Proyek harus melakukan hal yang sama saat orientasi karyawan dan program penyegaran kembali. Kami tak dapat memastikan efektivitas sistem pengaduan kecuali kami yakin penerimanya dapat menggunakannya secara mudah dan nyaman.

Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, perusahaan minyak dan gas lain kini juga telah beroperasi di Teluk Bintuni. Hal ini menimbulkan kecemasan mengenai masalah keamanan dan sosial, serta dampak kumulatif yang mungkin memengaruhi masyarakat. Perusahaan-perusahaan ini mungkin tidak akan menghormati kepentingan lokal dan dapat memicu aksi yang memprovokasi reaksi keras dari aparat keamanan masyarakat. Intervensi BP terhadap salah satu perusahaan – Genting Oil – tahun lalu sukses mengubah praktiknya dari menurunkan personel TNI, menjadi menggunakan kontraktor keamanan swasta sama seperti BP.³⁶ Jika perusahaan lain datang ke sana dengan mengerahkan TNI atau polisi sebagai personel keamanan, atau mengambil langkah lain yang akan meningkatkan ketegangan sosial, BP harus mengusulkan agar mereka mengubah praktik dan mematuhi prinsip ICBS. Tak hanya itu, BP harus meningkatkan komunikasi dengan perusahaan-perusahaan tersebut guna mewujudkan sikap kooperatif dan dukungan bersama untuk proyek-proyek lokal yang akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

³⁶ Untuk penjabaran lebih lanjut mengenai situasi ini, lihat laporan TIAP November 2012 halaman 15.

Terakhir dan tak kalah penting, isu pertahanan Tangguh terhadap serangan maya. Peristiwa baru-baru ini membuktikan sistem terbaik pun dapat diretas dengan konsekuensi menakutkan. Panel meninjau pendekatan Tangguh yang matang dan berlapis, sebagian besarnya berasal dari persyaratan keamanan BP Group. TIAP bukan pakar keamanan maya, karena itu takkan mengkritik pertahanan yang telah dibangun. Meski demikian, Tangguh harus memiliki rencana untuk mematikan kilang secara aman bila ada yang berhasil menembus *firewall* dan membahayakan kegiatan operasional. Rencana cadangan seperti itu memastikan konsekuensi serangan maya dapat diminimalkan meskipun serangannya hanya setengah berhasil. Kedua, BP harus mencegah pihak lain, termasuk SKKMigas, mengakses sistem operasinya. Akses tersebut akan sangat mengancam keamanan. Ketiga, mengingat dinamika teknologi keamanan maya, pertahanan maya harus dievaluasi oleh pakar secara rutin.

Rekomendasi: Keamanan dan Hak Asasi Manusia

- 1. Sebagai bagian dari proses pembaruan JUKLAP, sosialisasi ICBS harus ditingkatkan, terutama terkait dengan perlunya pembatasan penangkapan ikan.**
- 2. Harus ada latihan tahunan bagi personel keamanan terkait penggunaan pentungan atau perangkat lain yang dapat menyebabkan cedera.**
- 3. Pangdam harus didorong untuk melanjutkan pelatihan HAM bagi pasukan TNI yang akan dikerahkan ke Tangguh bila terjadi keadaan darurat.**
- 4. BP harus bekerja sama dengan kepolisian untuk menjadikan latihan bersama tahunan sebagai simulasi yang lebih realistis. Latihan bersama juga harus terus digelar terpisah dari latihan HAM atau kegiatan lain.**
- 5. Sistem pengaduan harus terus disosialisasikan baik di kampung yang terkena dampak atau di kalangan karyawan agar semua dapat memahami dan menggunakannya.**
- 6. BP harus membatasi dukungannya terhadap kehadiran personel polisi dan TNI di kampung pada komunikasi dan forum publik yang menginformasikan masyarakat mengenai keamanan, HAM, dan ICBS.**
- 7. BP harus memiliki rencana untuk mematikan kilang bila ada serangan maya yang berhasil tembus, dan mencegah pihak eksternal mengakses sistem operasinya.**

VI. Program untuk DAV dan Area Yang Terkena Dampak Langsung

A. Perencanaan Bersama Masyarakat (PBM/ CAPs)

Sejak konstruksi dimulai, fokus program sosial BP di wilayah itu adalah DAV yang merupakan kampung-kampung di dekat lokasi proyek yang sejak awal diidentifikasi dalam AMDAL pertama sebagai daerah yang terkena dampak langsung. Selain bantuan khusus yang diberikan ke kampung-kampung tersebut terkait pemukiman kembali, Program Sosial Terpadu (“ISP”) Tangguh dan Perencanaan Bersama Masyarakat (“PBM/ CAPs”) disediakan secara merata bagi semua kampung DAV. Sebagai hasilnya, kampung DAV mulai mekar dan bertambah banyak; dari yang pada awalnya terdapat sembilan kampung, menjadi 13 kampung pada saat ini, dan sudah ada permintaan untuk pemekaran lebih lanjut. Pemilihan kampung DAV didasarkan pada kondisi geografis, tapi cukup acak karena jelas membedakan antara kampung yang akan menerima bantuan ISP dan PBM/ CAPs dan anggota suku yang sama yang tinggal agak jauh dan hanya sedikit menerima bantuan langsung³⁷. Kecemburuan dan ketidakadilan muncul diantara kampung di pesisir pantai utara dan kampung RAV di pesisir pantai selatan, dan diantara kampung DAV dan kampung non-DAV³⁸.

AMDAL baru mencoba memperbaiki perbedaan ini dengan memperluas ISP, yang kini akan disebut sebagai Program Pembangunan Keberlanjutan Tangguh (“TSDP”), hingga mencakup semua anggota keempat suku asli di wilayah pesisir pantai Teluk Bintuni /Fakfak. Ini merupakan pengembangan yang ambisius dan implementasi efektifnya akan menghadapi berbagai tantangan. Tapi hal ini akan menyebarkan bantuan langsung program sosial ke kelompok yang lebih besar dan lebih jelas definisinya. Seiring dengan perluasan ISP, BP mengakhiri program PBM/ CAPs, yangmana telah diwajibkan oleh AMDAL sebeumnya untuk dilakukan selama 10 tahun. TIAP yakin bahwa sebagian besar kampung yang terkena dampak langsung, baik yang diberi label DAV atau tidak, berhak mendapatkan bantuan program secara berkelanjutan. Sejak program dimulai pada tahun 2004, PBM/ CAPs telah memberikan bantuan senilai \$30,000 per tahun kepada setiap kampung DAV, mulai dari dermaga dan renovasi gang hingga pembangunan masjid, rumah guru dan renovasi sekolah, hingga program usaha wanita.

³⁷ Total jumlah bantuan yang diberikan seluruh program sosial tidak sebesar jumlah dana yang mengalir ke kapupaten dari bagi hasil sumber daya alam Tangguh yang tahun lalu mencapai Rp113 miliar.

³⁸ Lihat Laporan TIAP 2002 halaman 12 dan laporan Panel 2003 halaman 14.

Tiap kampung menjalankan proses tata kelola dan memilih infrastruktur atau program tahunan yang paling sesuai dengan kondisinya.³⁹

Kini ada program pemerintah yang menyediakan bantuan dana pengelolaan serupa bagi semua kampung di Papua, misalnya program Musrenbang Kampung dan program PNPM Mandiri/Respek yang mengalokasikan Dana Otonomi Khusus sebesar Rp100 juta per kampung per tahun. Tapi program-program ini tak ada hubungannya dengan meredakan dampak atau membagi bantuan dari Tangguh. Mereka bukan pengganti PBM/ CAPs. PBM/ CAPs berfungsi sebagai tambahan bantuan bagi kampung yang paling terkena dampak yang penghuninya sebagian besar masih masyarakat asli Papua yang tinggal sangat dekat dengan Tangguh.⁴⁰ Alokasi bantuan dana pengelolaan harus dilanjutkan, setidaknya bagi kampung pesisir pantai asli yang dulunya adalah kampung DAV.

B. Pemukiman dan Infrastruktur Pesisir Utara

Pemukiman di pesisir pantai utara masih menjadi masalah jangka panjang penting yang masih harus diatasi. Sejak awal, ada kecemburuan antara kampung di pesisir pantai utara (suku Sebyar) dan di pesisir pantai selatan (suku Simuri dan Irarutu), yang direlokasi dan diberi kompensasi berupa rumah modern, fasilitas kemasyarakatan dan keagamaan baru, serta listrik. Ketegangan ini kian meningkat karena warga kampung pesisir pantai utara percaya bahwa bahwa gas ada di tanah mereka, dan meskipun demikian mereka tidak diberi kompensasi layak. TIAP menkampunk BP untuk menanggapi keluhan ini dan BP telah berupaya melakukannya.⁴¹ Sejak awal, BP mendirikan pusat pelatihan keterampilan di Kota Aranday di pesisir pantai utara untuk mengajarkan pertukangan kayu, pekerjaan listrik, dan keterampilan kantor bagi masyarakat asli, serta berniat menggunakan kayu dari pembukaan lahan kilang LNG untuk pemukiman dan infrastruktur di pesisir pantai utara. Karena berbagai hal, rencana ini gagal.⁴²

³⁹ *lihat, antara lain*, Apendiks 2 laporan TIAP 2006 dan Apendiks 4 laporan TIAP 2007 yang membahas penggunaan CAP pada saat itu.

⁴⁰ Lihat analisis data sensus 2013 di bagian VI(F) dan (G) di bawah.

⁴¹ *Lihat, antara lain*, laporan TIAP 2003 halaman 14-15 dan laporan Panel 2005 halaman 13, 16.

Di tahun 2008, sebagai bagian dari rekomendasi TIAP, BP dan Pemerintahan Kabupaten mendirikan Yayasan Pengembangan Teluk Bintuni untuk fokus pada pemukiman dan infrastruktur di pesisir pantai utara.⁴³ Meski hal ini menghasilkan peningkatan kecil, yayasan itu belakangan ini memfokuskan proyeknya pada peningkatan transportasi bus dan infrastruktur kampung. Pendanaannya yang kecil dan kesulitan manajemen menghalanginya mencapai hasil yang bermakna dalam hal renovasi pemukiman.

AMDAL baru akan mewajibkan BP untuk kembali fokus pada masalah ini. Nota Kesepakatan telah dilaksanakan antara BP, SKKMigas dan Pemerintah Kabupaten untuk menyediakan pendanaan program renovasi pemukiman. Studi ini dijalankan untuk mempelajari opsi yang tersedia. TIAP menyambut baik komitmen baru ini. Saat mengunjungi kampung pesisir pantai utara, tampak jelas infrastruktur fisik dan pemukiman tak banyak berubah sejak kedatangan Tangguh. Meski pemukiman baru di beberapa kampung dapat menimbulkan kecemburuan di kampung lain, keberhasilan program perbaikan pemukiman di kampung pesisir yang terkena dampak langsung setidaknya memberikan warga kampung tersebut manfaat materiil yang layak mereka dapatkan.

Sumber pendanaan program ini belum terselesaikan. Perdasus Papua Barat yang baru mengenai dana bagi hasil (DBH) minyak dan gas mengalokasikan 20% dari pendapatan sumber daya alam Tangguh untuk dana perwalian dan program pengembangan masyarakat yang dikelola adat.⁴⁴ Jika memungkinkan, dana ini harus dialokasikan dari sumber tersebut. Tak hanya itu, BP dapat menyumbangkan material dan dukungan nyata lainnya sebagai pengakuan terhadap hak adat ini. Kayu dari pembukaan kilang LNG masih ada di kilang dan mungkin masih bisa digunakan, serta ada banyak pohon yang harus ditebang untuk pangkalan pekerja baru. Batang pohon tersebut dapat digiling menjadi kayu dan digunakan untuk program ini. Penggergajian dan kayu harus menjadi kontribusi Tangguh. Hal ini merupakan rencana awal dan kini tampaknya dapat dijalankan. Apa pun solusi masalah material dan pendanaan, BP, bekerja sama dengan Bupati, harus menyelesaikan program pemukiman baru di pesisir pantai utara saat kilang 3 diresmikan.

⁴²Lihat laporan TIAP Maret 2009 halaman 25-26.

⁴³Lihat Laporan TIAP 2009 halaman 26-28.

⁴⁴Lihat bagian X(A) di bawah.

Ada isu tambahan terkait apakah sebagian dari rumah-rumah itu harus direnovasi ataukah harus dibangun rumah baru di lokasi baru. TIAP membahas masalah ini dengan Bupati. Meski kampung tak boleh dipindahkan tanpa persetujuan penuh berlandaskan informasi lengkap, TIAP merasa bahwa beberapa kampung, terutama Weriagar dan Mogotira, mungkin sebaiknya dibangun kembali di lokasi baru. Kampung-kampung tersebut dibanjiri oleh Teluk Bintuni; sebagian besarnya malah tenggelam saat pasang naik. Kegiatan pertanian di area ini hampir mustahil dilakukan. Kenaikan permukaan laut cuma akan memperburuk masalah ini. Penduduk kampung harus diberi tahu mengenai semua opsi yang tersedia dan masing-masing konsekuensinya, dan BP harus mendukung apa pun pilihan yang diambil penduduk kampung berdasarkan informasi yang lengkap.

C. Elektrifikasi

Jika pemukiman merupakan isu jangka panjang paling penting, elektrifikasi daerah sekitar adalah isu jangka pendek paling penting. Terjangkaunya harga elektrifikasi permanen bagi rumah atau tempat usaha merupakan peningkatan dramatis. Listrik berbasis diesel (dan solar) dipasang di kampung RAV saat mereka dibangun, tapi tak ada yang tersedia untuk kampung DAV.⁴⁵ Di tahun 2013, setelah penundaan panjang, PLN memasang sistem distribusi di berbagai kampung DAV setelah BP membangun unit pembangkit listrik 8 MW dan menghubungkannya dengan gardu induk PLN dekat kilang LNG. Seperti disebutkan di atas, listrik mengalir ke Kota Bintuni di bulan Februari 2014, dengan daya 4 MW, sebelum kesepakatan AMDAL baru. Kendati begitu, jaringan listrik belum tersedia di kampung DAV lain di pesisir pantai utara dan selatan, atau di Babo. BP berkomitmen mendukung PLN untuk mengatasi isu ini di AMDAL baru; BP harus segera melakukan dan memprioritaskannya.

⁴⁵ TIAP mendorong BP memperluas jaringan listrik ke semua DAV di pesisir utara sejak 2006. *Lihat* laporan TIAP Maret 2006 halaman 28.

Mengatasi tantangan tersebut mungkin butuh waktu, tapi tidak mustahil. BP harus bekerja sama dengan PLN dan Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, UP4B, untuk membangun infrastruktur ini. Selagi pembangunan berjalan, BP harus meminta persetujuan SKKMigas untuk elektrifikasi sementara berbasis diesel bagi kampung-kampung tersebut dan Babo saat mereka menunggu infrastruktur PLN, dengan persyaratan dan harga seperti yang diajukan PLN. Elektrifikasi akan meningkatkan kualitas hidup tetangga Tangguh secara materiil dan tak boleh ditunda sampai tahun depan.

D. Kesehatan

Dalam sepuluh tahun pertamanya, ISP memberikan bantuan materiil bagi semua kampung DAV, terutama di bidang kesehatan, pendidikan, dan mata pencaharian. Layanan kesehatan dan pendidikan meningkat pesat dalam periode ini. TIAP mencatat penurunan prevalensi malaria di kampung DAV dari 23% di tahun 2000 ke 0,08% di tahun 2013. Dengan mendukung Dinas Kesehatan lokal, BP bertujuan membebaskan Teluk Bintuni dari malaria di tahun 2020. Wabah diare sebagai penyebab utama kematian anak ⁴⁶ juga menurun drastis, diikuti dengan peningkatan kematian ibu dan anak serta imunisasi anak. ⁴⁷ Persalinan yang ditangani staf medis, umumnya bidan terlatih, naik dari 32% di tahun 2009 menjadi 66% di tahun 2013. ⁴⁸ Keberhasilan ini disebabkan oleh Unit Kesehatan Masyarakat Tangguh (“THCU”) BP yang kini disebut Kesehatan Masyarakat dan dijalankan oleh yayasan lokal yaitu Yayasan Sosial Augustinus (“YSA”). Yayasan ini membangun pos kesehatan dan melatih warga di tiap kampung untuk menjadi bidan dan mampu membagikan obat non-resep. BP juga mendukung rumah sakit Bintuni yang baru dibangun dengan memberikan bantuan teknis dan donasi peralatan pemeriksaan medis yang membuat rumah sakit itu mampu melakukan 15 pemeriksaan medis per hari.

⁴⁶ Lihat laporan TIAP Maret 2009 halaman 34-35.

⁴⁷ Imunisasi anak mencapai 88% di tahun 2013, namun sangat tersendat di beberapa DAV, di mana tingkatnya di bawah 10%. Lihat Apendiks III dan “Sensus dan Survei Sosial Ekonomi di Kabupaten Teluk Bintuni 2013,” Universitas Gadjah Mada, 2013. Pihak berkepentingan dapat melihat hasil survei ini dengan menghubungi TIAP.

⁴⁸ *Idem*.

BP akan menghadapi tantangan kesehatan besar dalam lima tahun ke depan. BP harus mempertahankan berbagai peningkatan ini di bekas kampung DAV dan menghindari penyebaran penyakit infeksi saat ribuan pekerja berdatangan ke area itu, sekaligus memperluas program bagi masyarakat asli di Teluk Bintuni pada saat bersamaan. Untuk melakukannya, BP harus bekerja sama dengan pakar yang andal dan berdedikasi, serta memenuhi kebutuhan mereka. Salah satu kebutuhan itu adalah kontrak yang lebih panjang dengan Pemerintah Daerah agar pekerja medis dapat memanfaatkan kemampuan yang mereka kembangkan secara lebih baik; kerja sama lebih luas dalam hal perubahan tingkah laku adalah kebutuhan lain yang harus dipenuhi.

Seiring pengembangan program kesehatan BP, BP harus memfokuskan upayanya di Babo yang terkena dampak langsung Tangguh dan memiliki populasi jauh lebih besar dari kampung DAV. Meski ada klinik di Babo, kapasitasnya terbatas. BP tengah meningkatkan fasilitas ini, terutama kapasitasnya untuk merespons persalinan gawat darurat dan perawatan anak yang merupakan kebutuhan paling penting. Saat meningkatkan fasilitas ini, BP juga harus mendukung kebutuhan masyarakat lebih luas terhadap perawatan medis gawat darurat dan transportasi gawat darurat. Setelah ada rumah sakit di Bintuni yang berjarak tiga jam perjalanan perahu, klinik yang dapat menstabilkan kasus gawat darurat dan mengirimnya ke Bintuni atau tempat lain yang mampu menyelamatkan nyawa.

E. Pendidikan

Kualitas pendidikan dasar dan menengah di kampung DAV dan Bintuni mengalami banyak peningkatan, sebagian besarnya merupakan hasil kerja mitra BP, British Council, serta Dinas Pendidikan Kabupaten. Kemampuan membaca di kalangan anak-anak dan wanita dewasa meningkat, tapi angka buta huruf di kalangan orang dewasa masih sangat tinggi, berkisar dari 50% di Babo hingga 96% di Tomage. Tingkat kehadiran murid sekolah naik, tapi jumlah anak tak sekolah masih di atas 10% di beberapa kampung dan lebih dari 20% di Tomu. Tingkat kelulusan murid SMU yang mencapai 100% dalam tiga tahun terakhir kurang meyakinkan dan jangan dijadikan barometer kinerja sesungguhnya.

Tak dapat dibantah bahwa pendidikan dasar dan menengah telah meningkat secara materiil sejak tahun 2003. Tapi jelas pula bahwa standarnya masih harus dinaikkan agar lulusan dapat dilatih untuk pekerjaan yang membutuhkan keterampilan atau dapat meneruskan pendidikan ke perguruan tinggi. Ini akan menjadi tantangan mengingat kontrak dengan British Council kini telah berakhir dan BP harus bermitra dengan tim pakar baru. AMDAL baru juga mewajibkan BP memperluas program pendidikannya ke wilayah lebih luas. Kepergian British Council dapat memundurkan program pendidikan. BP harus mencari mitra jangka panjang yang sama andalnya dan dapat melanjutkan pengembangan kapasitas Dinas Pendidikan Kabupaten.

Dalam hampir tiap kunjungan ke kampung DAV, pemimpin kampung berterima kasih namun juga meminta dukungan lebih luas untuk pendidikan mulai dari rumah guru, buku, suplai, hingga komputer. Seperti dijelaskan dalam laporan sebelumnya,⁴⁹ BP telah bermitra dengan tiga yayasan berbasis agama yang menyediakan rotasi guru sekolah dasar di kampung DAV. Program sekolah dasar ini harus berlanjut untuk jangka panjang. BP harus memperhatikan kebutuhan mitra-mitra ini dan memenuhinya bila mampu.

Sama seperti kontrak tenaga medis, pemimpin kampung dan LSM mencemaskan singkatnya masa kontrak guru yang mengurangi efektivitas mereka. BP harus bekerja dengan mitra-mitranya dan Pemerintah Daerah untuk mengatasi masalah masa kontrak dan perpanjangan kontrak guru. BP harus memberi dukungan finansial atau insentif lain untuk mempertahankan guru-guru yang ingin tetap tinggal dan memiliki kinerja baik.

Salah satu inovasi yang diajukan BP adalah pendirian beberapa sekolah unggulan di wilayah itu seperti sekolah magnet di AS. Hal ini untuk menanggapi permintaan masyarakat dan akan sangat membantu pencapaian tujuan jangka panjang. Setidaknya satu harus didirikan di pesisir utara dan satu di pesisir selatan. Dukungan juga harus diberikan kepada asrama siswa.⁵⁰ BP harus bekerja sama dengan Dinas Pendidikan lokal untuk menentukan lokasi dan membangun sekolah dan fasilitasnya tersebut agar konsep ini dapat menjadi nyata.

⁴⁹ *Lihat, antara lain*, laporan TIAP Maret 2007 halaman 22-23 dan laporan Panel Maret 2008 halaman 29-30.

F. Pembangunan Ekonomi dan Mata Pencaharian

Universitas Gadjah Mada (“UGM”) melaksanakan sensus/survei setiap dua tahun sekali di wilayah sejak sejak 2003. Hal ini merupakan salah satu kegiatan paling bermanfaat yang dapat mengukur pembangunan ekonomi, serta indikator kesehatan dan pendidikan. Survei ini memberikan tolok ukur objektif terkait perubahan demografik, ekonomi dan sosial di DAV dan perbandingannya dengan kampung serupa yang tak termasuk dalam program. Sensus ini sangat dibutuhkan oleh pengamat independen dan harus dilanjutkan setiap dua tahun selama masa operasional Tangguh.⁵¹

Setelah meningkat sekitar 80% sejak 2003, populasi kampung DAV menjadi stabil di periode 2011-2013 sejumlah 11.500 jiwa, dengan peningkatan di beberapa kampung (Tofoi: naik 21%) dan penurunan di kampung lainnya (Weriagar: turun 21%). Masyarakat asli Papua kini mewakili sekitar 52% populasi dan migran non-Papua mewakili sekitar 27% (sebagian besarnya di empat lokasi). Di tahun 2003, sekitar 83% penduduk DAV adalah masyarakat asli Papua.

Pendapatan rumah tangga di semua kampung DAV meningkat drastis sejak konstruksi dimulai dan dalam kurun waktu dua tahun terakhir. Rata-rata pendapatan rumah tangga meningkat lebih dari 400% sejak 2003, dari 245% di Mogotira, hingga 962% di Taroy. Pertumbuhan paling pesat terjadi sejak 2011 seiring peningkatan rata-rata pendapatan di atas 100%. Pendapatan rumah tangga bulanan terendah di tahun 2013 berada di Mogotira (Rp5.409.371, naik 58% sejak 2011) dan tertinggi di Taroy (Rp11.175.334, naik hampir 350% sejak 2011). Meski pendapatan penduduk non-Papua yang tinggal di kampung-kampung itu lebih tinggi, pendapatan masyarakat asli dan warga Papua lain naik di periode 2011-2013. Di kampung-kampung tertentu terjadi peningkatan jumlah pekerja di sektor perikanan dan di kampung lain terjadi peningkatan jumlah pekerja di sektor pertanian, keduanya bisa jadi disebabkan pembelian ikan dan udang serta sayur-mayur dan buah-buahan dari *stocking point* lokal.⁵²

⁵⁰ Konsep ini gagal di sekolah tingkat menengah di Tanah Merah Baru.

⁵¹ *Lihat* “Sensus dan Survei Sosial Ekonomi di Kabupaten Teluk Bintuni 2013,” Universitas Gadjah Mada, 2013. Seperti disebutkan sebelumnya, pihak berkepentingan dapat melihat hasil survei ini dengan menghubungi TIAP.

Sejak 2008, sumber pendapatan luar utama bagi DAV adalah penjualan buah, sayur, udang dan ikan ke jasa boga Tangguh (saat ini dikontrakkan ke Indocater), dengan total 345 ton senilai sekitar Rp 6 miliar di tahun 2013 (sekitar \$500,000). Ada tujuh *stocking point* di berbagai kampung di Teluk. Ada keluhan dari warga kampung mengenai jarangya pengambilan dari *stocking point* (Onar) dan penundaan pembayaran produk terjual (Taroy). BP harus membahas isu-isu ini dengan Indocater dan koperasi yang dibentuk kampung untuk membeli produk-produk itu dan menjualnya ke Tangguh, dan mengatasi isu-isu tersebut; atau jika tidak bisa, pelelangan kembali kontrak jasa boga Tangguh harus memuat persyaratan khusus mengenai frekuensi pengambilan tiap minggu dan mekanisme untuk memastikan pembayaran cepat dan rutin bagi semua pembelian, termasuk persyaratan dalam kontrak dengan koperasi. TIAP telah menikmati semua produk lokal ini, semuanya berkualitas tinggi. Jasa boga Tangguh harus memprioritaskan pembelian produk-produk lokal ini sepenuhnya.

Program mata pencaharian fokus pada diversifikasi pertumbuhan di kampung DAV, dan bertujuan untuk meningkatkan praktik pertanian dan perikanan, pengelolaan ekonomi rumah tangga, dan pengembangan usaha mikro. Hal ini menghasilkan beragam kesuksesan, terutama terkait produksi buah dan sayuran yang umumnya dikelola oleh kelompok wanita, dan dalam pengelolaan rumah tangga serta tabungan, sebagian besarnya juga oleh kelompok wanita. Meski demikian, kemajuannya lambat. Bentuk dukungan ini akan diperlukan dalam jangka panjang untuk mencapai hasil berkelanjutan. Program ini juga akan diperluas ke wilayah lebih luas yang dicantumkan dalam AMDAL baru. Ini merupakan sebuah tantangan dan BP membutuhkan mitra yang andal untuk mengatasinya.

Setelah listrik tersedia di semua kampung DAV, program-program usaha ini dapat diperluas untuk mencakup produksi dan penjualan barang jadi, mungkin melalui kemitraan dengan pihak lain di Teluk Bintui atau wilayah lebih luas.

⁵² Lihat Apendiks III (grafik pendapatan dari UGM).

Salah satu prioritas pembangunan utama Bupati adalah sistem transportasi terpadu di Teluk Bintuni. Sistem ini, dan listrik, akan mendorong pembangunan ekonomi. Bupati telah meminta dukungan dan bantuan BP untuk visi ini. BP harus mencari jalan untuk mendukung rencana Bupati sebagai cara untuk menambah rantai nilai di kampung DAV.

Salah satu hasil nyata pengembangan mata pencaharian adalah bengkel sepeda dan sepeda motor yang didirikan tahun 2012 di Babo. Hal ini berguna serta bermanfaat bagi pemilik, pekerja dan masyarakat sekitar. Sudah ada bengkel motor perahu di dua kampung DAV, tapi modelnya tidak diikuti di lokasi lain dengan fungsi lain. Bengkel Babo harus dijadikan sebagai proyek percontohan. Setelah proyek ini terbukti berhasil, bengkel motor lain harus didirikan di tiap kampung DAV atau kota lain di wilayah yang terkena dampak yang jelas membutuhkannya. Dengan aliran listrik ke tiap kampung DAV, pelatihan teknisi listrik untuk tiap kampung DAV guna memperbaiki kerusakan kecil juga harus dipertimbangkan.

G. Kesejahteraan Penduduk Kampung DAV

Sensus UGM juga memantau indikator tingkat kesejahteraan dan kepuasan. Sensus itu menciptakan “indeks kesejahteraan” yang mengukur keberhasilan pembangunan yang terdiri dari tiga indeks: pendidikan, kesehatan dan ekonomi. UGM yakin peningkatan standar kehidupan dapat dilihat secara objektif melalui indeks kesejahteraan.⁵³ Indeks gabungan naik di tiap sensus dari tingkat awal 59,27 di tahun 2007 menjadi 69,83 di tahun 2011 hingga 73,66 di tahun 2013.⁵⁴

Rekomendasi: Program untuk kampung DAV dan Teluk Bintuni

- 1. PBM/ CAPs memberikan bantuan penting bagi kampung DAV. Meski PBM/ CAPs akan dihentikan pada tahun 2014, bantuan dana pengelolaan pengganti bagi kampung-kampung pesisir pantai yang terkena dampak harus berlanjut.**
- 2. Pemukiman, baik baru atau hasil renovasi, di kampung pesisir pantai utara harus jadi prioritas jangka panjang. BP harus mendukung program ini dengan memproduksi kayu dari pohon yang ditebang di kilang LNG.**
- 3. Elektrifikasi semua kampung DAV dan Babo harus jadi prioritas utama jangka pendek. Sampai saat PLN bisa memasang jaringan listrik, BP harus mendukung penyediaan listrik berbasis diesel di Babo.**
- 4. Seiring perluasan program perawatan kesehatan, BP harus terlebih dahulu fokus meningkatkan kapasitas dan fasilitas di Babo, termasuk kemampuan perawatan gawat darurat, kapasitas personel jangka panjang, dan transportasi gawat darurat ke Bintuni atau tempat lain.**
- 5. BP harus terus membangun kapasitas Dinas Pendidikan Kabupaten, mendukung pendidikan dasar di kampung yang terkena dampak, mendukung insentif guna mempertahankan guru andal untuk periode lebih lama, dan memfokuskan kemitraan pendidikan barunya pada pengembangan sekolah menengah unggulan.**
- 6. BP harus mengatasi isu pengangkutan *stocking point* dan pembayaran dengan Indocater dan koperasi kampung yang membeli dari masyarakat sebelum menjualnya ke Indocater. Jika tidak bisa, BP harus mencantumkan persyaratan untuk mengatasi keluhan ini dalam perpanjangan kontrak.**
- 7. Program pengembangan mata pencaharian dan pengelolaan ekonomi rumah tangga harus dilanjutkan dalam jangka panjang agar dapat menghasilkan produk-produk bernilai tambah. Visi jangka panjang mereka harus diarahkan ke penciptaan perekonomian rumah tangga yang mandiri dan berkelanjutan. Ini akan melindungi ekonomi rumah tangga dari dampak buruk dan kumulatif berbagai proyek pembangunan yang akan dilaksanakan di wilayah ini.**
- 8. BP harus mendukung bengkel motor atau listrik di tiap kampung DAV jika dibutuhkan.**
- 9. Sensus/survei dua tahun sekali yang dilakukan UGM harus diteruskan untuk memantau kemajuan program mata pencaharian. Untuk meningkatkan kegunaannya, sensus juga harus memonitor tren pengeluaran (konsumsi dan investasi) serta tabungan masyarakat.**

⁵³ Indikator kesehatan dan pendidikan yang dimasukkan dalam pengukuran ini mencakup: prevalensi malaria, imunisasi anak, rata-rata masa sekolah, pendaftaran murid sekolah dasar, dan tingkat kemampuan membaca.

⁵⁴ Tabel dari sensus yang membandingkan pengukuran dari tahun 2009 hingga 2013 dicantumkan dalam Apendiks III.

VII. Ketenagakerjaan Masyarakat Papua, Pelatihan, dan Pengadaan

A. Perekrutan dan Pelatihan

BP menyadari bahwa ketenagakerjaan dan pengembangan karier masyarakat Papua adalah salah satu manfaat jangka panjang paling penting yang dibawa Tangguh ke Papua. Sesuai komitmen AMDAL, BP dan kontraktornya harus mempekerjakan 100% penduduk Papua di posisi non-terampil dan non-penyelia dan setidaknya 78% di posisi yang membutuhkan keterampilan dan 33% di posisi penyelia pada tahun 2029. Komitmen ini akan ditegaskan, tapi tidak dimodifikasi di AMDAL baru. Pada tahun 2012, BP dan kontraktor sudah mendahului jadwal. Sebanyak 54% dari jumlah pekerja total kini terdiri dari penduduk Papua. Seperti yang direkomendasikan TIAP, BP telah membentuk Komite Pengembangan Papua untuk meningkatkan fokus manajemennya guna memenuhi target perekrutan dan retensi.

Kendati demikian, persentase yang lebih tinggi akan semakin sulit untuk dicapai. Meski tingkat pekerja Papua sudah mencapai 54% di tahun 2011, persentasenya tetap 54% di tahun 2013. Ini angka yang tinggi mengingat Tangguh baru beroperasi kurang dari lima tahun dan salah satu alasan pemimpin Papua umumnya puas dengan BP. Tapi kini jelas bahwa peningkatan akan semakin sulit, terutama untuk posisi yang lebih membutuhkan keterampilan. Karena itu BP bertekad berusaha lebih keras dan akan memodifikasi program perekrutannya untuk periode konstruksi dengan tujuan menemukan, melatih dan mempertahankan pekerja Papua yang memiliki keterampilan untuk memenuhi target operasionalnya di masa depan.

BP juga akan menerapkan program Pengembangan Teknisi Operasional dan Perawatan (O&M) Papua baru. Petugas perekrutan akan menelusuri pusat-pusat populasi di Papua guna mencari siswa potensial yang memiliki bakat dan tekad untuk mempelajari kemampuan teknis tanpa pendidikan universitas. Pelatihan dan pengembangan teknisi O&M akan dilakukan di pusat Keterampilan & Keunggulan di luar Papua. Siswa yang tak terpilih sebagai teknisi O&M tapi memiliki potensi akan mendapatkan peluang untuk ke *feeder pool* untuk dilatih di beberapa pusat perdagangan di Papua. Pusat perdagangan akan mengajarkan kemampuan yang dibutuhkan BP dan kontraktornya, termasuk mekanik motor, teknisi industri dan pemasang pipa; serta keterampilan yang akan dibutuhkan termasuk perancah *rigging*, pengoperasian *fork lift*,

pengoperasian derek, pengelasan dan pengerjaan pipa leding. Untuk meningkatkan peluang sukses, program magang baru akan diadakan di fasilitas yang menawarkan kualifikasi internasional serta memenuhi standar nasional Indonesia; ini akan dihubungkan dengan Sistem Penilaian Manajemen Kompetensi (CMAS) BP dan Tangguh hingga sejalan dengan kurikulum dan program global BP; dan jumlah siswanya akan lebih banyak dari jumlah yang dibutuhkan untuk meningkatkan peluang menghasilkan lulusan yang akan direkrut dan dipertahankan.

Hingga kini, BP telah mengirim segelintir siswa tiap tahun ke pusat pelatihan kejuruan Cepu di Jawa. Upaya baru ini tentu meningkatkan peluang Tangguh untuk memenuhi target ketenagakerjaan masyarakat Papuanya, dan memiliki manfaat sampingan yaitu melatih penduduk Papua terkait kemampuan yang akan berguna bagi banyak perusahaan lain.⁵⁵ Perluasan program perekrutan juga harus dibantu oleh karyawan Papua Tangguh untuk merekomendasikan rekan, teman, atau anggota keluarga yang tertarik terhadap latihan ini.

Program pengembangan teknisi O&M baru dibangun dari program pengembangan teknisi terdahulu di mana pekerja terampil Papua diberi pelatihan operasional LNG selama tiga tahun. Hal ini sudah berjalan selama tujuh tahun dan lulusan dari enam gelombang pertama dipekerjakan di Tangguh dan beberapa di antaranya dipromosikan ke posisi yang membutuhkan keterampilan tinggi dan posisi penyelia.⁵⁶ Salah satu elemen program magang yang menjadi penghambat kemajuan dan dikeluhkan teknisi adalah ketersediaan pelatihan bahasa Inggris.⁵⁷ BP telah mengatasi masalah ini dengan menyediakan kelas bahasa Inggris di Manokwari dan Jayapura bagi semua yang berminat. Sejauh ini, 110 teknisi telah mendaftarkan diri dengan tingkat kehadiran lebih tinggi dibanding kelas yang sebelumnya diadakan di Tangguh.

⁵⁵ Dalam banyak hal, program ini merupakan versi lebih besar dari pusat pelatihan kejuruan yang didirikan di Aranday untuk melatih penduduk Teluk Bintuni, yang gagal karena sedikitnya pekerja yang dapat mempergunakannya.

⁵⁶ Dari total 116 peserta program magang, 90 menyelesaikan program dan 41 di antaranya dipekerjakan oleh Tangguh.

Atas permintaan beberapa pihak, BP telah menambahkan pelatihan komputer. Kursus bahasa Inggris saat pekerja tidak di kilang sejauh ini tampaknya lebih disukai daripada kursus bahasa Inggris saat sedang bertugas 12 jam dalam sehari di Tangguh. Ini merupakan solusi menjanjikan dan harus diteruskan selama teknisi berpartisipasi. BP harus menjajaki permintaan untuk lokasi pelatihan tambahan, misalnya Fakfak atau Sorong.

BP juga akan melanjutkan program *Challenger* untuk lulusan universitas di seluruh Indonesia. Program ini telah menghasilkan 12 karyawan Papua, tapi hanya tiga yang direkrut di tahun 2013, hanya segelintir dari total yang diterima. Tak ada satu pun *Challenger* terpilih yang berasal dari Teluk Bintuni. BP telah berupaya meningkatkan jumlah pekerja Papua, tapi hingga kini hasilnya tak banyak. Di Tangguh ada pekerjaan untuk individu yang berpotensi menduduki posisi penyelia dan bahkan posisi tingkat senior di Perusahaan. BP harus memfokuskan upayanya merekrut lebih banyak masyarakat Papua ke dalam program ini.

Hal tersebut terutama terkait dengan perekrutan. Retensi dan pengembangan karier sama pentingnya dalam jangka panjang. BP Tangguh harus memberikan perhatian lebih pada jenjang karier staf Papua yang kompeten di Tangguh, baik secara horizontal atau vertikal, serta pengembangan karier mereka di masa depan. Perhatian khusus terhadap pelatihan dan pembimbingan harus diberikan manajer atasan mereka yang juga harus membantu rencana pengembangan staf. BP harus menentukan target bagi para manajer atasan ini dan penghargaan bagi mereka yang mencapai target tersebut.

Isu lain terkait perekrutan tenaga kerja yang masih belum selesai adalah keharusan BP untuk mendorong pencapaian target perekrutan masyarakat Papua oleh kontraktor BP. Isu yang tak sepenuhnya berada dalam kendali BP ini akan bertambah penting dalam periode konstruksi. Prioritas perekrutan masyarakat Papua dicantumkan dalam kontrak BP dengan kontraktor, tapi sejauh ini sulit bagi BP untuk mendorong pencapaian target itu. Dulu TIAP telah

⁵⁷ Lihat laporan TIAP November 2012 halaman 33-35.

merekomendasikan denda untuk kegagalan memenuhi target perekrutan masyarakat Papua.⁵⁸

Jika ingin program Pengembangan Teknisi Papua yang baru ini berhasil, kontraktor harus mempekerjakan orang-orang yang melengkapi program itu. BP harus menjelaskan persyaratan ini ke semua kontraktor sebelum kontrak mereka ditandatangani dan menjatuhkan denda di dalam kontrak bila mereka gagal memenuhi persyaratan yang telah disepakati tersebut.

Terakhir, meski kini 54% pekerja adalah masyarakat Papua, beberapa pihak yakin angka tersebut dilembungkan karena diperkirakan 40%-nya bukan etnis Papua. AMDAL menggariskan empat klasifikasi orang Papua yaitu A, B, C dan D; hanya golongan A dan B yang beretnis Papua.⁵⁹ TIAP enggan mendebat masalah ini, tapi kini jelas bahwa BP tidak akan mencapai semua target bila mayoritas pekerja Papuanya bukan etnis Papua. BP mengakui pentingnya tolok ukur ini. BP harus memprioritaskan semua program perekrutannya bagi etnis Papua. Fokusnya harus ditujukan pada penduduk Papua dari wilayah Teluk Bintuni /Fakfak.⁶⁰ Penduduk Bintuni harus diberikan kesempatan pertama dan jika memungkinkan, harus dipilih untuk dilatih agar memiliki kualifikasi untuk pekerjaan yang tersedia.

⁵⁶ Lihat laporan TIAP Maret 2009 halaman 68, 70.

⁵⁷ Orang Papua A berarti kedua orang tuanya adalah orang Papua; Orang Papua B berarti salah satu orang tuanya adalah orang Papua; Orang Papua C berarti menikah dengan orang Papua; dan Orang Papua D berarti lahir di Papua dan telah tinggal di Papua minimal 10 tahun.

⁵⁸ Tujuh suku yang tinggal di wilayah Teluk Bintuni adalah Wamesa, Iraputu, Soub, Sebyar, Kuri, Moskona, dan Simuri. Empat di antaranya bermukim di daerah pesisir yang mengelilingi Tangguh. Lihat Apendiks I untuk peta lokasi suku-suku di wilayah Teluk Bintuni.

B. Pengembangan Usaha dan Pengadaan dari Masyarakat Papua

Program Pemberdayaan Usaha Kepala Burung dirancang untuk meningkatkan kapasitas usaha regional dan membangun rantai suplai lebih kuat untuk Tangguh. Program ini dijalankan sejak tahun 2008. Program ini membimbing pengusaha lokal agar dapat menyuplai atau melayani Tangguh atau kontraktor lain. Di tahun 2013, total nilai kontrak yang didapatkan anak didik program ini mencapai \$38,9 juta. Angka ini datar selama tiga tahun. Hanya 12% dari kontrak-kontrak tersebut yang terkait Tangguh; sebagian besarnya adalah pembelian oleh Pemerintah.

Program ini bermanfaat dan penting, tapi hasilnya tidak sesuai harapan. Konstruksi kilang 3 akan mendatangkan lebih banyak peluang untuk pembelian barang dan jasa yang disediakan penduduk Papua. BP harus memfokuskan pelatihan dan pembimbingan pada wilayah yang akan dibutuhkan saat konstruksi, dan mendorong kontraktor dan subkontraktor *engineering, procurement and construction* (“EPC”)-nya untuk mempekerjakan usaha-usaha lokal ini jika memungkinkan. Standar teknis dan usaha yang ditetapkan Tangguh dan kontraktornya merupakan tantangan bagi keberhasilan inisiatif ini. BP harus langsung mengatasi masalah ini melalui program pelatihannya, dan mempertimbangkan membuat sistem di mana perusahaan Papua yang berhasil menyelesaikan pelatihan agar diutamakan untuk kegiatan konstruksi.

Rekomendasi: Ketenagakerjaan Masyarakat Papua, Pelatihan dan Pengadaan

- 1 BP harus menggalakkan program Teknisi O&M Papua-nya yang baru secara agresif untuk memenuhi kebutuhan perekrutan kegiatan operasional saat ini dan di masa depan. BP juga harus mendukung pengembangan pusat perdagangan di Papua untuk menghasilkan tenaga kerja Papua terampil guna memenuhi kebutuhan BP dan kontraktor konstruksinya.**
- 2 BP harus terus menyediakan pelatihan bahasa Inggris bagi peserta yang membutuhkannya. BP harus mencari tahu apakah ada permintaan untuk program ini di Sorong, Fakfak atau lokasi lain.**
- 3 BP harus menjelaskan dan menggalakkan pencapaian target perekrutan masyarakat Papua oleh kontraktornya, termasuk denda atas kegagalan untuk mencapai target yang telah disepakati.**

- 4 Etnis Papua, terutama dari wilayah Teluk Bintuni, harus diprioritaskan dalam semua program perekrutan dan pelatihan masyarakat Papua.
- 5 BP harus memfokuskan program pemberdayaan usahanya pada barang dan jasa yang akan dibutuhkan saat konstruksi, dan mendorong kontraktor dan subkontraktor EPC-nya untuk mempergunakan perusahaan-perusahaan itu jika memungkinkan. BP harus membuat sistem prioritas bagi perusahaan yang memenuhi standar BP.

VIII. Hubungan Pemerintah dan Urusan Publik

Komunikasi BP dengan pejabat regional dan lokal telah meningkat secara materiil sejak kunjungan terakhir TIAP. Gubernur Atururi dan Bupati Alfons mengakui kemajuan ini yang sebagian besarnya berkat sikap kooperatif penuh yang ditunjukkan BP kepada kedua pejabat tersebut dalam proses AMDAL dan elektrifikasi Kota Bintuni. Peningkatan ini tak boleh hanya sesaat saja. Komunikasi yang baik dengan Pemerintah Daerah yang akan memimpin semua program sosial Tangguh harus berlanjut selama periode konstruksi karena ketegangan dapat meningkat dari kedatangan pekerja baru dan saat program-program ini diterapkan bagi masyarakat yang lebih luas.

BP juga harus menjalin komunikasi rutin dengan Pangdam dan Kapolda karena meski berkedudukan di Jayapura, keduanya merupakan pengambil keputusan penting terkait keamanan Tangguh dan berniat mengontraskan Tangguh dengan Freeport. Keduanya harus terus diberi informasi mengenai perkembangan dan diundang untuk mengunjungi kilang LNG. Pengangkatan Direktur Keamanan BP baru-baru ini dapat mengakomodasi kontak rutin itu.

Program komunikasi BP di Jakarta sejauh ini tidak efektif. Tak banyak yang berubah sejak terakhir kali TIAP menganjurkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap manfaat Tangguh bagi Indonesia.⁶¹ Malah kini BP harus menyebarkan informasi positif untuk menangkai

⁶¹ *Lihat, antara lain*, laporan TIAP November 2012 halaman 19-21. “Dari sedikitnya berita tentang Tangguh, sebagian besarnya mengangkat soal perlunya renegotiasi kontrak LNG dengan Tiongkok, yang umumnya dianggap merugikan bagi Indonesia. Artikel-artikel tersebut menyiratkan bahwa Tangguh merugikan Indonesia. Baru-baru ini ada berita mengenai

kian menguatnya seruan nasionalisasi sumber daya alam. Reputasi industri minyak dan gas telah merosot dalam beberapa tahun terakhir. BP tak dapat mengubah tren ini, tapi BP bisa menyediakan fakta dan informasi yang menunjukkan manfaat Tangguh bagi Papua dan negara. Jika Tangguh berniat menjadi contoh positif bagi pengembangan sumber daya alam di Indonesia, BP harus mempublikasikan kegiatannya agar diketahui oleh masyarakat.

Pentingnya komunikasi itu terlihat sebelum kunjungan TIAP, ketika Tempo, majalah mingguan terbesar di Indonesia, menurunkan berita utama berjudul, “*A Surprise from 10 Downing Street: Tangguh: Beyond Papua.*”⁶² Artikel tersebut berisi data-data tidak akurat dan kebenaran yang setengah-setengah, mengulangi tuduhan bahwa Ratu Elizabeth II memfasilitasi persetujuan Pengembangan Tangguh dengan memberi gelar kesatria pada Presiden Yudhoyono serta menyatakan bahwa pemerintah Inggris memiliki BP. Tapi lebih dari itu, halaman sampul menyatakan bahwa, “*FUNDING THE LNG REFINERY 3 IN TANGGUH WILL REDUCE STATE REVENUES BY RP 12 TRILLION. THE PROJECT IS SUSPECTED OF GETTING SPECIAL FACILITIES AND POLITICAL LOBBYING.*” Tuduhan yang mengindikasikan pendanaan pengembangan menyebabkan kerugian besar bagi negara ini merupakan tema utama artikel panjang tersebut.⁶³ Artikel ini memuat sisipan berjudul, “*Cheap Gas for China.*” Tidak jelas kenapa Tempo memuat berita ini dan membesar-besarkannya; bisa jadi alasannya politis dan tak berhubungan langsung dengan BP. Tapi sekarang, banyak yang membaca artikel tersebut memandang BP sebagai perusahaan asing yang berniat mencuri sumber daya gas alam Indonesia dan menjualnya murah di luar negeri. Selain sorotan di ujung artikel dari wawancara video konferensi dengan William Lin, Presiden BP Asia-Pacific, tak ada indikasi bahwa BP pernah membahas isu-isu ini dengan reporter atau editor majalah ini.

apakah LNG Tangguh dari Kilang 3 sebaiknya digunakan untuk keperluan domestik, tema lain yang menyiratkan bahwa LNG Tangguh lebih menguntungkan negara lain daripada Indonesia. Karena itulah ketiadaan berita ini dan pemberitaan negatif tersebut harus ditangkal dengan fakta mengenai manfaat Tangguh bagi Papua dan Indonesia. Fakta-fakta ini dapat disampaikan dengan meningkatkan kegiatan hubungan dengan pejabat pemerintahan papan atas dan dengan menggalakkan kegiatan urusan publik dan media. Kedua fungsi ini dapat meningkatkan pengakuan terhadap Tangguh sebagai aset nasional dan pemahaman program-program sosialnya serta manfaat mereka bagi penduduk Papua.”

⁶² “A Surprise From 10 Downing Street: Tangguh: Beyond Papua,” TEMPO, Mar. 4, 2014.

⁶³ TIAP tidak akan membahas substansi tuduhan ini. BP telah melakukannya melalui tanggapan yang dikutip di bawah. Perlu dicatat bahwa tuduhan itu terkait metode pembiayaan pengembangan dan pengembalian biaya proyek, serta apakah pendapatan Indonesia akan dimaksimalkan dalam jangka pendek atau jangka panjang.

BP langsung bereaksi keras, berujung pada tanggapan poin demi poin terhadap Tempo. Setelah wawancara dengan The Jakarta Post, muncul satu artikel bernada positif mengenai Tangguh yang bahkan tidak mengangkat masalah pendanaan.⁶⁴ Pemberitaan positif ini sifatnya sangat reaktif dan kemungkinan besar takkan terjadi bila tidak ada berita Tempo tersebut. Strategi urusan publik BP tak boleh reaktif, melainkan harus berinteraksi dengan media-media penting secara rutin. Ringkasan singkat mengenai manfaat keuangan Tangguh bagi Negara, terutama hasil dari pengembangan, dan manfaat sosialnya bagi penduduk Papua harus rutin dipresentasikan kepada jurnalis-jurnalis terkemuka. BP juga harus menggunakan perangkat media sosial untuk berkomunikasi mengingat tingginya penggunaan media sosial oleh penduduk Indonesia. Penyampaian kabar terkini serta laporan perkembangan dan keberhasilan secara rutin melalui Facebook atau Twitter atau platform lain akan sangat bermanfaat mematahkan persepsi publik bahwa Tangguh tidak bermanfaat bagi Indonesia.

Masih terkait soal itu, Tangguh harus lebih menonjolkan perannya sebagai pemimpin pengembangan masyarakat di Papua dan di tingkat nasional. Semua orang dewasa di Papua dan hampir semua orang dewasa di Jakarta tahu bahwa Freeport mengalami masalah keamanan dan hubungan masyarakat. Sangat sedikit yang tahu bahwa Tangguh mengalami hal yang sangat berbeda. BP tak boleh terlalu membanggakan diri atas bantuan bagi masyarakat atau kontribusi ke pendapatan negara; semuanya harus berimbang. BP adalah kontraktor dan hanya mengoperasikan kilang. Pemerintah, dan kemitraan BP dengan lembaga Pemerintah Indonesia, harus diakui perannya dalam kesuksesan itu. Salah satu bentuk pengakuan ini adalah peningkatan penggunaan nama “Tangguh.” Baik beasiswa Tangguh atau listrik Tangguh, bangsal Tangguh di rumah sakit Bintuni, program pencegahan penyakit Tangguh, atau guru-guru yang disponsori Tangguh, bantuan-bantuan paling materiil dan berdampak panjang harus langsung diasosiasikan dengan Tangguh.

⁶⁴ “BP Upbeat over Selling Kilang 3 Gas Despite Projected Glut,” THE JAKARTA POST, Mar. 12, 2014.

Komunikasi dan hubungan dengan masyarakat sangatlah penting. BP harus mempertahankan konsultasi publik di wilayah proyek karena para pemangku kepentingan yang terdampak langsung inilah yang akan menentukan reputasi Tangguh di tingkat nasional. Dalam setahun terakhir, sebagai bagian dari proses AMDAL, BP menjalankan kegiatan komunikasi publik yang sangat bermanfaat. Saat konstruksi dimulai, BP juga harus kembali menggalakkan dialog publik rutin yang sudah sering diadakan. Forum pemangku kepentingan harus digelar tiap tahun, baik di Bintuni atau Babo, atau mungkin Fakfak, dengan mengundang Pemerintah dan elemen masyarakat di tiap area untuk taklimat dan diskusi. Forum tingkat kampung yang telah dilaksanakan dengan baik oleh tim komunikasi BP harus diteruskan dan difokuskan pada dampak konstruksi, ICBS dan cara-cara BP mendukung masyarakat dengan lebih baik. Terakhir, BP harus melanjutkan program untuk mengajak pemimpin kampung dan kecamatan ke Tangguh serta terus menerbitkan laporan berkala lokal selama periode konstruksi.

Rekomendasi: Hubungan Pemerintah dan Urusan Publik

- 1. BP harus meneruskan hubungan positifnya dengan kepala daerah sepanjang periode konstruksi, termasuk kontak rutin dengan Pangdam dan Kapolda.**
- 2. Tim urusan publik BP harus berinteraksi aktif dengan media-media utama, dan menggunakan perangkat media sosial untuk berkomunikasi lebih efektif.**
- 3. BP harus menonjolkan Tangguh sebagai pemimpin pengembangan masyarakat.**
- 4. Forum pemangku kepentingan harus dilanjutkan tiap tahun di Teluk Bintuni untuk mendapatkan masukan dari Pemerintah, elemen masyarakat, dan pihak berkepentingan lain. BP juga harus meneruskan program kunjungan kepala kampung ke kilang LNG pada saat periode konstruksi.**

IX. Tata Kelola dan Transparansi

Dukungan terhadap tata kelola dan transparansi yang lebih baik masih merupakan elemen penting bagi keberlanjutan semua program sosial dan pemanfaatan pendapatan Tangguh yang produktif dan bersih. Dukungan ini harus diberikan di tingkat lokal yang paling membutuhkannya. Pendapatan sumber daya alam dari Tangguh kini mengalir ke Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni dalam jumlah besar. Penguatan lembaga-lembaganya hanya membantu memastikan uang ini digunakan dengan baik. Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM telah menyelesaikan bantuannya di bidang tata kelola dan transparansi di tingkat kabupaten dan kampung sejak pertama kali dimulai tahun 2009. Hal ini jelas meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah dan DPRD setempat.⁶⁵ Dukungan yang berkelanjutan dan efektif pun jelas sangat dibutuhkan agar Pemerintah Kabupaten dapat mencapai kapasitas rata-rata; saat ini Teluk Bintuni masih berada di peringkat terbawah dalam daftar kapasitas semua Pemerintahan Kabupaten. Laporan keuangannya tak bisa diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (“BPK”) karena ketiadaan transparansi. BP harus membantu Bupati menaikkan standar transparansi menjadi “wajar tanpa pengecualian” hingga dapat diaudit sepenuhnya.⁶⁶ Upaya ini akan dianggap berhasil bila pengamat eksternal yakin pendapatan Tangguh digunakan secara efektif untuk membangun Kabupaten.

Pengembangan kapasitas Pemerintah Teluk Bintuni merupakan tantangan besar yang membutuhkan komitmen jangka panjang yang berkelanjutan. Kegiatan UGM, atau bentuk bantuan serupa, harus dilanjutkan. Program UGM untuk tata kelola tingkat kabupaten berakhir Maret 2013; kontrak UGM untuk tata kelola tingkat kecamatan dan kampung berakhir Januari 2014. Meski perpanjangan program kini tengah dalam proses tender sesuai Peraturan Pemerintah Indonesia, akan ada jeda panjang terkait peralihan dari mitra lama lalu periode tahap awal

⁶⁵ Program ini dijabarkan secara spesifik dalam laporan TIAP November 2012 halaman 35-36.

⁶⁶ Sistem audit BPK dijabarkan sepenuhnya dalam laporan TIAP November 2012 halaman 37-38.

untuk mitra baru. Jeda seperti itu bukanlah implementasi yang efektif. Jika regulasi SKKMigas tidak mengizinkan perpanjangan program yang tengah berjalan tanpa tender kompetitif, BP harus menenderkan kontrak baru sebelum kontrak yang sekarang berakhir untuk mempertahankan keberlanjutan atau setidaknya meminimalkan interupsi.

Papua Barat juga sangat membutuhkan bantuan tata kelola, terutama dalam hal transparansi.⁶⁷ Meski BP harus tetap memfokuskan dukungan tata kelolanya di tingkat lokal, BP juga harus mempertahankan kehadiran dan posisinya sebagai pendukung transparansi di tingkat provinsi. Kebutuhan ini tampak dari vonis yang dijatuhkan terhadap seluruh 44 anggota DPRD provinsi atas penyalahgunaan anggaran. BP telah mendukung lokakarya di Manokwari yang menjelaskan mengenai peraturan minyak dan gas. BP harus memperluas upaya ini dengan mendukung kegiatan antikorupsi dan inisiatif transparansi. Ini bukan program jangka pendek. Sepanjang masa operasional Tangguh, BP harus dipandang sebagai pendukung Pemerintahan yang bersih dan transparan di ibu kota provinsi.

Untuk mencapai tujuan transparansi itu, BP harus menjajaki peluang kerja sama dengan pihak eksternal, misalnya Bank Dunia, untuk melaksanakan analisis pengeluaran. Hal ini dapat dilakukan di tingkat kabupaten dan/atau tingkat provinsi. Analisis ini tidak akan menggantikan audit resmi, tapi dapat mengakomodasi perhitungan anggaran yang lebih baik, dan bisa difokuskan pada penggunaan Dana Otonomi Khusus dan pendapatan Tangguh. Tentu saja hal ini membutuhkan kerja sama Gubernur dan/atau Bupati. Analisis demikian dapat dipandang sebagai bukti peningkatan akuntabilitas sebelum akhir masa tugas sepuluh tahun Gubernur dan Bupati.⁶⁸ BP membahas analisis pengeluaran itu dengan UGM, tapi karena protes mahasiswa Papua di UGM, diskusi ini ditangguhkan.⁶⁹ Jika Gubernur dan Bupati setuju, protes ini tidak

⁶⁷ Lihat laporan TIAP November 2012 halaman 35-39 untuk pembahasan penuh mengenai transparansi di tingkat regional dan peran BPK.

⁶⁸ Bank Dunia melaksanakan analisis serupa untuk seluruh Papua di tahun 2005 dengan kerja sama penuh Gubernur Solossa yang menjabat saat itu. Lihat laporan TIAP Maret 2007 halaman 34.

akan menghalangi pelaksanaan studi tersebut. Seandainya UGM tak dapat berpartisipasi, BP harus berdiskusi dengan Bank Dunia atau lembaga lain yang mampu, mungkin bekerja sama dengan UNIPA, untuk mencari tahu apakah analisis itu dapat dilaksanakan di Papua Barat dan/atau Teluk Bintuni di tengah tingkat transparansi yang ada sekarang. Jika Bank Dunia menyimpulkan bahwa analisis itu dapat berguna, BP harus membahasnya dengan Gubernur dan Bupati, serta mendukung studi ini jika para kepala daerah itu setuju.

Rekomendasi: Tata Kelola dan Transparansi

- 1. Dukungan jangka panjang untuk tata kelola yang lebih efektif dan transparansi di tingkat kabupaten sangat penting untuk keberhasilan program sosial Tangguh serta penggunaan pendapatan Tangguh dengan baik. Untuk memastikan implementasi yang efektif, BP harus menghindari jeda dan gangguan dalam program ini.**
- 2. BP harus memfokuskan dukungannya untuk pemerintah provinsi Papua Barat dalam hal transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik.**
- 3. BP harus berkonsultasi dengan Bank Dunia atau lembaga lain yang mampu, serta Gubernur dan Bupati untuk menentukan apakah analisis pengeluaran anggaran mereka masing-masing dapat dilaksanakan.**

X. Pengelolaan Pendapatan Tangguh

A. Bagi Hasil Pendapatan Sumber Daya Alam

Pendapatan dari Otonomi Khusus terus meningkat di tingkat provinsi dan kabupaten. Di tahun 2013, pendapatan yang ditransfer sebagai Dana Otsus ke Papua Barat sebesar Rp1,72 triliun (sekitar \$150 juta). Selain itu juga ada dana sebesar Rp1,71 triliun yang ditransfer ke provinsi sebagai Dana Perimbangan yang diterima semua provinsi di bawah otonomi daerah.⁷⁰

⁶⁹ Para mahasiswa itu menolak studi yang dilakukan universitas non-Papua untuk industri ekstraktif dan menyatakan hasil studi tersebut bias dan memarginalkan penduduk Papua.

Tak hanya itu, semua provinsi dan kabupaten/kota menerima sebagian pendapatan dari proyek sumber daya alam di wilayah mereka. Otonomi Khusus memberikan tambahan dana bagi hasil yang lebih besar kepada Papua dan kabupaten/kotanya. Pendapatan gas alam dan minyak, setelah *first tranche petroleum*, pajak dan *cost recovery*, dibagi 70% untuk provinsi dan seluruh wilayah di bawahnya dan 30% untuk pemerintah pusat.⁷¹ Untuk gas alam, dari 70% pendapatan yang diberikan ke provinsi, 30% (dari total pendapatan) dibagi berdasarkan formula tetap – 6% untuk provinsi, 12% untuk kabupaten penghasil, dan 12% untuk seluruh kabupaten/kota lain di provinsi. Sisa 40% untuk provinsi dialokasikan hanya melalui Perdasus yang harus diterbitkan oleh provinsi dan disahkan oleh Pemerintah Indonesia.⁷²

Pendapatan sumber daya alam dari Tangguh telah meningkat signifikan sejak produksi dimulai. Pendapatan sumber daya alam yang ditransfer ke Papua Barat dan kabupaten/kotanya naik drastis antara tahun 2012 dan 2013.⁷³ Teluk Bintuni menerima 12% sesuai alokasi formula, yang mewakili sekitar 16% total anggarannya tahun 2013. Hal ini tidak termasuk tambahan 40% yang kini akan dialokasikan sesuai perdasus DBH.

Alokasi 40% dana pengelolaan pendapatan sumber daya alam telah menyebabkan kontroversi dan keprihatinan. Meski sudah lebih dari 12 tahun sejak pemberlakuan Otonomi Khusus, baru sekarang pemerintah daerah dan Majelis Rakyat Papua (“MRP”) dapat menyepakati alokasi. Sebagai hasilnya, perencanaan atau pemanfaatan dana pengelolaan ini sebelumnya tidak memungkinkan. Isu ini kini telah dipecahkan, terutama berkat pengembangan dan proses AMDAL baru yang mengharuskan tindakan-tindakan tersebut.

⁷⁰ Dalam FY 2013, Provinsi Papua Barat secara langsung menerima Rp3,6 triliun (sekitar \$300 juta). Jumlah ini umumnya dari Dana Perimbangan yang mengendalikan transfer uang di bawah otonomi daerah ke semua provinsi, dan dari Dana Otsus yang diberikan khusus untuk provinsi-provinsi Papua dan memajihkan 80%-nya dialokasikan untuk kesehatan dan pendidikan serta sisanya untuk infrastruktur. Transfer ini lebih tinggi per kapita dibandingkan 31 provinsi Indonesia lainnya. Meski demikian, Provinsi Papua dan Papua Barat masih merupakan dua provinsi termiskin Indonesia dengan 32% penduduknya berada di bawah garis kemiskinan, dan Teluk Bintuni adalah salah satu kabupaten termiskin di Papua Barat.

⁷¹ Untuk gas alam, hal ini adalah kebalikan bagi hasil provinsi yaitu 30%/70%; untuk minyak, bagi hasil biasanya 15%/85%. Formula khusus ini berlaku selama 25 tahun sejak pemberlakuan Otonomi Khusus (sampai 2027), dan setelahnya pembagian akan kembali ke 50%.

⁷² Bagan yang menampilkan alur pembagian ini dicantumkan di Apendiks IV.

⁷³ Ini mencakup formula alokasi 6% untuk provinsi dan 40% yang akan dialokasikan di masa depan sesuai perdasus.

Sebelum Gubernur, Bupati dan pemimpin adat menyetujui pengembangan Tangguh, mereka berkeras mengenai kesepakatan yang melandasi bagi hasil. BP mendukung proses ini, terutama dengan mendanai studi akademik yang dilaksanakan UGM dan UNIPA serta dengan memfasilitasi pertemuan antara Kementerian Keuangan, Gubernur, dan Bupati. Kesepakatan itu mengalokasikan separuh dari 40% berdasarkan formula, dengan 6% untuk provinsi, 7% untuk kabupaten penghasil, 7% untuk kabupaten lainnya dan 2% untuk pembangunan universitas. Sebanyak 20% sisanya dibagi rata antara dana perwalian yang dikelola adat untuk kebutuhan suku asli di masa depan dan dana pengembangan masyarakat untuk kebutuhan lokal saat ini. Selain pejabat terpilih, pemimpin adat dan MRP juga menyepakati alokasi ini. Meski Kementerian Dalam Negeri masih harus mengesahkan perdasus DBH, sudah ada kesepakatan bahwa perdasus ini sudah pasti disahkan.

Tak hanya itu, Bupati cemas biaya konstruksi kilang 3 dapat mengganggu aliran pendapatan sumber daya alam selama periode konstruksi. Karena pengembangan ini dibiayai sebagai tambahan fasilitas yang sudah ada dan bukan sebagai proyek yang berdiri sendiri, biayanya dapat ditalangi penjualan LNG dari kilang 1 dan 2. Karena itu, bagi hasil pendapatan dapat berkurang untuk beberapa waktu sebelum meningkat lebih tinggi setelah kilang 3 beroperasi. Untuk mencegah kemungkinan ini, BP telah sepakat menunda pembayaran kembali PPN selama yang diperlukan untuk mempertahankan formula porsi alokasi bagi hasil pendapatan gas alam bagi Kabupaten. Sesuai Perdasus DBH, Pemerintah Kabupaten dan masyarakat asli juga akan menerima jatah tambahannya masing-masing 7% dan 20%. Dengan kedua kesepakatan ini, Bupati dan DPRD dapat merencanakan anggaran mereka untuk proyek dan program saat periode konstruksi.

B. Klaim Kepemilikan Adat

Sejak sebelum konstruksi Tangguh, suku Sebyar di pesisir pantai utara berkeras bahwa mereka berhak mendapat kompensasi atas hak mereka atas gas alam di tanah mereka. Meski klaim adat ini tak memiliki dasar hukum dalam hukum Indonesia, mengingat Undang-Undang Dasar menyatakan bahwa semua sumber daya alam dimiliki oleh negara, Undang-Undang Otonomi Khusus mewajibkan tradisi adat dan hak adat yang sah untuk dihormati, dan semua pemimpin di Papua pun merasa bahwa klaim sah ini harus ditanggapi. Mematuhi kehendak ini, di tahun 2010 Pemerintah Indonesia sepakat membayar kompensasi ke suku Sebyar sebesar Rp 6 miliar sesuai inisiatif Bupati, namun semua pihak merasa bahwa pembayaran ini tak memenuhi total klaim sebesar Rp60 miliar.

Banyak pemimpin adat meminta BP membayarkan kekurangan kompensasi ini. BP tidak dapat membayar klaim adat. BP adalah kontraktor Pemerintah Indonesia dan salah satu pemilik Tangguh. Dalam beberapa kesempatan, TIAP mengusulkan agar klaim adat terkait Tangguh dapat dan harus ditangani sebagai bagian dari Perdasus yang mengatur bagi hasil dari Tangguh. Hal ini kini mungkin dilakukan. Perdasus DBH kini akan mengalokasikan 20% dana bagi hasil untuk mengakui hak adat, 10% dari alokasi itu akan didedikasikan untuk membentuk dana perwalian adat untuk generasi mendatang. Meski jumlahnya di masa depan tak bisa diketahui, alokasi ini seharusnya dapat mencapai Rp54 miliar dalam beberapa tahun. BP harus terus berkonsultasi dengan semua pihak lokal yang terkena dampak klaim ini, dan mendukung usaha untuk mengimplementasikan pengakuan adat melalui alokasi ini, tapi harus menjelaskan bahwa perdasus DBH kini merupakan panduan mekanisme pembayaran klaim ini.

C. Transparansi Bagi Hasil Pendapatan

Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi bagian dari aliran dana sesuai perdasus DBH. Perdasus DBH mencakup persyaratan bahwa “Pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota harus mengelola dana bagi hasil (“DBH”) minyak dan gas sesuai ketentuan secara efisien, ekonomis, efektif, transparan dan akuntabel dengan menjunjung keadilan, kewajiban/legitimasi dan manfaat bagi masyarakat”.⁷⁴ Mengingat rendahnya tingkat transparansi di Papua Barat dan Teluk Bintuni, dan ketidakmampuan BPK mengaudit kedua pemerintahan tersebut tanpa status “menolak

memberikan pendapat”, perdasus DBH kini menyediakan peluang langka untuk meningkatkan transparansi. Jika analisis pengeluaran terhadap seluruh anggaran provinsi atau kabupaten tidak memungkinkan, BP harus menjajaki kemungkinan untuk melakukan analisis tersebut terhadap pendapatan sumber daya alam bersama Gubernur dan Bupati. BP juga dapat membahas analisis itu dengan SKKMigas dan Kementerian Keuangan yang mendukung transparansi transfer dana bagi hasil. Ini akan jadi perpanjangan alami dari kian menguatnya komitmen Indonesia terhadap Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif (EITI).⁷⁵

Rekomendasi: Pengelolaan Pendapatan

- 1. BP harus mendukung penggunaan dana yang dialokasikan Perdasus dana bagi hasil sumber daya alam oleh Pemerintah Daerah untuk pengakuan klaim adat yang sah terkait kepemilikan suku terhadap sumber daya alam.**
- 2. BP harus membantu pembentukan dan pengembangan kapasitas pengelolaan badan yang akan mengurus dana perwalian untuk 10% bagi hasil pendapatan minyak dan gas yang dialokasikan Perdasus DBH.**
- 3. BP harus mendorong Gubernur dan Bupati untuk mengimplementasikan peraturan transparansi dan akuntabilitas dalam perdasus DBH dengan mendukung analisis pengeluaran terhadap semua pendapatan sumber daya alam yang ditransfer ke provinsi.**

⁷⁴ Bagian VI ayat 11. Ini merupakan peningkatan dari draf sebelumnya yang hanya menyatakan: “pembukuan dan pelaporan laporan keuangan dana dari kontrak kerja sama minyak dan gas dan dana otonomi khusus oleh Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

⁷⁵ lihat laporan TIAP November 2012 halaman 37.

XI. Lingkungan

TIAP tidak meninjau kinerja lingkungan Tangguh secara mendetail. Hal ini ada dalam cakupan Panel Eksternal Peminjam, yang setiap tahun memonitor kepatuhan lingkungan Tangguh terhadap AMDAL 2002 dan standar yang disetujui dalam kesepakatan pinjaman. Kementerian Lingkungan Hidup juga mengaudit kepatuhan lingkungan Tangguh setiap tahun. TIAP meninjau isu-isu lingkungan yang memengaruhi penduduk asli Teluk Bintuni dan reputasi BP.

Menteri Lingkungan Hidup (satu-satunya orang Papua di Kabinet sekarang) puas dengan kinerja lingkungan BP dan mendukung pengembangan Tangguh. Di tahun 2012, Kementerian Lingkungan Hidup memasukkan Tangguh ke dalam program audit lingkungan nasional untuk operasi industri (disebut sebagai “PROPER”). Program ini memberi penilaian terhadap kinerja lingkungan berdasarkan lima warna. Emas untuk kategori tahunan tertinggi, diikuti hijau, biru, merah dan hitam. Sebuah proyek hanya dapat meraih status hijau dengan tingkat kepatuhan 100% berikut program lingkungan dan sosial tambahan. Sebuah proyek hanya dapat meraih status emas setelah tiga tahun berturut-turut meraih hijau. Tangguh ditempatkan di kategori kepatuhan biru untuk tahun 2012 karena biru merupakan nilai tertinggi untuk audit PROPER pertama. Tapi di tahun 2012 dan 2013, nilai Tangguh berfluktuasi karena konsentrasi amonia di limbah air yang dihasilkan yang berujung pada nilai biru kedua.⁷⁶ Hal ini disayangkan dan tak mencerminkan perhatian dan perawatan yang dilakukan BP untuk memastikan kepatuhan lingkungan hidup di Tangguh. Berbagai tindakan telah dilaksanakan untuk mencegah hal ini terjadi kembali. BP bertekad meraih status emas. Tujuan ini harus dicapai bila BP ingin Tangguh dipandang sebagai model pembangunan kelas dunia. BP telah menerapkan sistem yang dapat mewujudkan kepatuhan 100%. BP harus mengerahkan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencegah insiden terisolir seperti yang terjadi dalam dua tahun terakhir.

⁷⁶ Konsentrasinya lebih tinggi dari yang diperbolehkan meski jumlah limbah masih dalam batas yang diizinkan.

Di tahun 2013, BP melaksanakan survei perikanan keempat,⁷⁷ dan studi mamalia laut dan bakau kedua di wilayah itu. Survei-survei ini dilakukan sebagai bagian dari monitor rutin dan juga akan menjadi landasan AMDAL baru. Survei ini mencakup kualitas air dan penilaian hidrodinamika, potensi sumber daya perikanan (misalnya keragaman, penaksiran stok, masyarakat nelayan lokal), dan keragaman mamalia dan reptil laut, serta habitat di Bintuni dan Teluk Berau di dekatnya. Survei tersebut menyimpulkan ada 118 spesies ikan. Hasil perikanan lestari diperkirakan sekitar 2.340 ton per tahun sementara ekstraksi hanya sekitar 116 ton per tahun; estimasi stok udang lestari adalah sekitar 3.000 ton per tahun dan ekstraksi saat ini sekitar 240 ton per tahun; ekstraksi kepiting saat ini sekitar 2 juta ekor per tahun sedangkan ekstraksi lestari diperkirakan sekitar 13 juta ekor kepiting per tahun. Stok ikan lestari kini sekitar 50% lebih tinggi dibanding stok ikan tahun 2007. Peningkatan ini disebabkan pengurangan kegiatan pukat harimau komersial di area itu. Hanya ada sedikit kegiatan perikanan komersial di tahun 2013; meski demikian, beberapa kegiatan pukat harimau komersial kembali berjalan di awal tahun 2014. Empat spesies penyu dan beberapa sarang penyu teridentifikasi di Berau/Teluk Bintuni. Tiga spesies mamalia laut juga teridentifikasi dalam survei tersebut.

Studi tahun 2013 itu menunjukkan bahwa sejauh ini tidak ada dampak negatif Tangguh terhadap lingkungan sekitarnya, terutama stok ikan, udang dan kepiting di Teluk Bintuni. Meski demikian, perlindungan sumber daya ini jangan sekadar dilakukan, tetapi juga harus diinformasikan pada publik. Survei ini harus terus dilakukan secara rutin untuk menentukan apakah ada dampak negatif terhadap sumber daya dan agar Tangguh mampu melindungi diri dari klaim tidak berdasar. Hasilnya harus dikabarkan kepada pejabat Pemerintah Daerah dan pusat serta disosialisasikan dengan kepala kampung dan suku yang beberapa di antaranya menyalahkan Tangguh atas variasi stok ikan atau kepiting di Teluk.

⁷⁷ BP melakukan studi sumber daya perikanan dasar di Teluk Bintuni tahun 2004 bersama UNIPA serta studi lanjutan di tahun 2007 dan 2009 bersama Institut Pertanian Bogor ("IPB").

BP juga harus terus memonitor kemungkinan kontaminan agar dapat menentukan apakah kegiatan konstruksi atau operasional di masa depan memengaruhi kualitas air. Sebagai bagian dari implementasi AMDAL 2002, kegiatan monitor lingkungan dilakukan secara rutin. Tak hanya itu, survei dasar lingkungan dilakukan tahun 2012 dan 2013 untuk AMDAL baru, mencakup musim hujan dan panas, untuk membarui data hasil survei dasar sebelumnya. Survei ini mencakup kualitas air laut dan sedimen di wilayah Teluk Bintuni yang lebih luas. TIAP paham bahwa AMDAL baru akan mewajibkan pemantauan rutin ini sepanjang periode operasional.

Ada dua prestasi khusus yang layak disebutkan. Pertama, melalui perubahan proses dan peningkatan efisiensi, BP telah mengurangi gas suar bakar secara dramatis. Dari level awal 13,3 Bcf di tahun 2010, jumlah gas terbuang menurun menjadi 2,6 Bcf di tahun 2013, dan penghematannya dapat mengisi hampir dua kapal LNG. Ini penghematan 79% dari tahun 2010, dan 58% dari tahun 2012. Ini tentu saja bermanfaat bagi lingkungan dan memiliki dampak tambahan yaitu mengurangi visibilitas api di kampung-kampung tetangga di Teluk Bintuni.

Kedua, BP telah menerapkan program daur ulang minyak goreng yang mengonversikan limbah ini menjadi biodiesel untuk digunakan kendaraan di Tangguh. Program ini kini memproduksi biodiesel cukup untuk lima kendaraan dan tengah dikembangkan agar dapat menyediakan bahan bakar bagi semua kendaraan di Tangguh. Sebagai manfaat tambahan, residu minyak yang tersisa setelah proses konversi biodiesel diproses menjadi sabun meski sejauh ini hanya pada tingkat laboratorium. Proses ini hanya menyisakan sedikit limbah minyak untuk ditransportasi ke fasilitas tersertifikasi. Ini merupakan inisiatif yang sangat bagus dan membuktikan komitmen Tangguh terhadap lingkungan.

Terakhir, pengembangan memberi peluang baru untuk meninjau opsi untuk mengurangi emisi CO₂, yang jumlahnya mencapai 4,73 juta ton di tahun 2013. Sebagian besarnya berasal dari produksi, di mana 12% dari gas umpang adalah CO₂.

Juga ada emisi dalam jumlah besar dari kegiatan operasional kilang, termasuk gas suar bakar, turbin, dan ketel. Opsi untuk reinjeksi atau pengurangan CO₂ pernah dibertimbangkan sebelum konstruksi awal, dan ditolak oleh BPMigas dan penerusnya, Pertamina, karena biayanya terlalu besar.⁷⁸ Opsi pengurangan CO₂ harus dijajaki lagi, terutama untuk sumur yang sedang dibor. Dalam sepuluh tahun terakhir, Indonesia telah menjadi salah satu pemimpin global dalam isu-isu perubahan iklim, dan mungkin dapat lebih menerima manfaat sistem pengurangan CO₂. Teknologi di bidang ini juga sudah berkembang. Pemerintah Indonesia kemungkinan tidak akan mengizinkan reinjeksi CO₂, tapi opsi baru yang menggunakan teknologi masa kini mungkin dapat mengurangi emisi CO₂ atau menguji metode untuk mengurangi emisi tersebut. BP harus menjajaki opsi yang tersedia dan mengajukan proposal pengurangan emisi atau pengujian teknologi baru kepada SKKMigas. Kemajuan apa pun dalam hal pengembangan atau demonstrasi teknologi pengurangan karbon akan sangat berguna dan disambut baik.

Rekomendasi: Lingkungan

- 1. BP harus mengalokasikan sumber daya untuk mengeliminasi ketidakpatuhan yang ada demi mencapai status hijau dan akhirnya emas dalam audit lingkungan hidup oleh Kementerian Lingkungan Hidup.**
- 2. Survei sumber daya ikan, udang, dan kepiting di Teluk Bintuni dan pemantauan lingkungan hidup harus dilanjutkan agar dampak konstruksi dan kegiatan operasional di masa depan dapat diukur.**
- 3. BP bersama SKKMigas harus menjajaki berbagai opsi untuk memakai atau menguji teknologi baru guna mengurangi emisi CO₂.**

⁷⁸ Lihat, *e.g.*, laporan TIAP Maret 2008 halaman 46-47.

XII. Manfaat Jangka Panjang Bagi Provinsi

Dengan Pengembangan Tangguh, manfaat jangka panjang yang lebih besar akan dirasakan oleh wilayah-wilayah Papua Barat selain Teluk Bintuni. Bantuan utamanya adalah penyediaan gas untuk membangkitkan listrik dan dukungan untuk Universitas Negeri Papua (UNIPA) di Manokwari. Dalam AMDAL baru, BP telah berkomitmen menyuplai hingga 15mmcf per hari dari produksi kilang 3 untuk membangkitkan listrik sekitar 50 sampai 80 MW di Papua Barat. Ini di luar komitmennya untuk menyediakan listrik di Teluk Bintuni, dan merupakan respons langsung terhadap visi Gubernur Atururi di mana Tangguh menjadi katalis pembangunan ekonomi di provinsi itu. Panel mendesak BP untuk menanggapi isu ini di AMDAL baru;⁷⁹ karena BP telah melakukannya, BP harus mendukung logistik kompleks dan perencanaan yang dibutuhkan demi menerapkan komitmen ini.

BP telah memulai studi kelayakan untuk menjajaki opsi yang ada. PLN yang akan menjadi partner penting dalam hal mengontrak transportasi suplai ini dan memodifikasi pembangkit listriknya bersikap kooperatif dan mendukung tujuan tersebut.⁸⁰ PLN yakin tantangan teknis dapat diatasi menggunakan tanker LNG mini seperti yang digunakan di Cina dan Norwegia. Sebuah tanker mini akan diisi dari dermaga LNG Tangguh atau dari salah satu tanker LNG besar Tangguh. Tanker mini itu akan mengirimkan LNG ke terminal penerima di berbagai lokasi di provinsi itu, mungkin mulai dari Fakfak, Sorong atau Manokwari. PLN yakin fasilitas-fasilitas ini dapat dibangun kurang dari dua tahun.⁸¹ PLN menganggap pembelian supai ini dari Tangguh sebagai usaha komersial dan bukan bakti untuk provinsi. Mengingat jarak untuk pengiriman LNG-nya relatif dekat dan kapal yang lebih kecil,

⁷⁹ Lihat laporan TIAP 2012 halaman 48-49.

⁸⁰ Gubernur mengusulkan untuk mendirikan perusahaan Papua baru guna mengirim gas ini dan menjalankan listrik di provinsi itu. Apa pun landasannya, usulan ini akan menunda proyek dan menciptakan komplikasi tambahan.

⁸¹ Opsi lain kini sedang dipertimbangkan, termasuk kapal LNG berukuran sedang, truk tangki LNG dan jaringan pipa. TIAP tidak berprasangka terhadap hasil studi dan akan mendukung opsi apa pun yang dipilih dan paling memungkinkan. PLN yakin tanker LNG mini adalah pilihan yang paling diminati.

tampaknya penjualan ini secara ekonomi memungkinkan bagi semua pihak. Karena itulah meski BP hanya mengalokasikan 15mmcf per hari, jika kesepakatan komersial dapat diraih dan dibutuhkan gas lebih banyak, jumlah tambahan harus dapat dipertimbangkan jika tersedia. Proyek ini akan membutuhkan dukungan Pemerintah Provinsi dan pusat, serta PLN. Di sisi lain, mewujudkan tujuan ini akan menjadi keberhasilan fundamental yang diberikan Tangguh bagi Papua; ini akan membuktikan manfaat yang dapat diberikan pengembang asing yang ahli kepada Indonesia, serta membantu mengukuhkan posisi Tangguh sebagai proyek pembangunan kelas dunia.

Kedua, TIAP sejak dulu mendorong BP untuk mendukung pendidikan lanjutan di provinsi pada umumnya, dan UNIPA pada khususnya.⁸² Kerja sama dan dukungan untuk UNIPA telah diberikan di beberapa bidang, membantunya tumbuh sebagai universitas regional yang luas dan ternama. Rektor sangat puas terhadap kerja sama BP dengan UNIPA untuk mendukung studi yang berujung pada Perdasus bagi hasil pendapatan sumber daya alam; untuk membantu mengembangkan sistem pasokan listrik bagi Teluk Bintuni; untuk melakukan studi dasar terkait stok ikan dan kontaminan di Teluk Bintuni; untuk mensponsori praktik kerja lapangan siswa di Kabupaten; untuk memberi taklimat mengenai AMDAL pada kampung-kampung; dan untuk memberikan pelatihan bahasa Inggris untuk staf teknis BP. BP menyediakan beasiswa bagi 25 mahasiswa UNIPA tiap tahun di jurusan matematika dan ilmu pengetahuan. Rektor berharap untuk mendirikan fakultas baru di Manokwari untuk jurusan teknik, teknologi, pendidikan dan ilmu pengetahuan sosial/politik. Dia juga memiliki visi untuk membangun kampus baru di Sorong untuk jurusan kedokteran dan kampus baru di Raja Ampat untuk studi perikanan dan kelautan. Semua ini merupakan peningkatan peluang pendidikan bagi masyarakat Papua. Meski tidak diwajibkan secara spesifik bagi AMDAL, BP harus menunjukkan kepemimpinannya di antara perusahaan lain yang beroperasi di Papua Barat dengan mendukung semua inisiatif ini.

⁸² *Lihat, antara lain, laporan TIAP November 2012 halaman 21.*

APENDIKS I

PETA PROVINSI PAPUA DAN PAPUA BARAT



SUKU-SUKU ASLI DI WILAYAH TELUK BINTUNI



Sumber: ANDAL Terpadu LNG Tangguh, 2002

APENDIKS II

PEMANGKU KEPENTINGAN YANG DITEMUI TIAP KUNJUNGAN 2014

Pejabat Pemerintah: Indonesia

Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, Wakil Menteri Keuangan
Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, MBA, Menteri Lingkungan Hidup
Nur Pamudji, Presiden Direktur PLN
Widhyawan Prawiraatmadja, Wakil Ketua SKKMIGAS Bidang Manajemen Komersial

Pejabat Pemerintah: Papua dan Papua Barat

Dr. Allimudin, MM, Kepala Bappeda
AKBP Cristian Amos Akeiwi, Wadirpam Obvit
Abraham O. Atururi, Gubernur Papua Barat
Yosef Yohan Auri, West Papua Legislative Council (DPRD)
dr. Andreas Ciokan, Kadin Kesehatan
Kombes Pol Heb Dehemm, Dirbinmas Polda,
Papua Bp. Edy, Kopolnas
Lukas Enembe, Gubernur Papua
Drs. Wim Fimbay, MM, Sekda Bintuni
AKBP.Reza Herasbudi,SIK,MM, Kapolres,
Bintuni Drs. Akuba Kaitam, Wakil Bupati Bintuni
Irjen Pol Drs.Tito Karnavian,MA, Kapolda, Papua
Derek Lokden, SH, Kadin Pendidikan Pemuda & Olah
raga Drs. Chris Mailoa, Kepala Bidang Koperasi &
UMKM IPTU. Junus Makamur, Kasat Intel Polres, Bintuni
Drg. Alfons Manibui, DESS, Bupati Bintuni
Drs. Gustaf Manuputy, Kadin Perhubungan Informastika dan Komunikasi
Simon S. Papa, S.sos, Kadin Perindustrian Perdagangan & Koperasi
Kopol. Rahareng, Wakapolres, Bintuni
Kombes Pol. Tatang, Karo Ops Polda, Papua
Widianingsih Sri Utami, SP Kadin Pertambangan
Vitalis Yumte, Head of MRP, Papua Barat
Mayjen TNI Drs. Christian Zebua, MM, Pangdam Cendrawasih, Papua

Pejabat Pemerintah: Amerika Serikat

Robert O. Blake, Duta Besar AS untuk Indonesia
James P. Feldmayer, Kantor Urusan Politik,
Kedutaan AS
Joel A. Kopp, First Secretary, Energy and Extractive Industries, Kedutaan AS

Pejabat Pemerintah: Kerajaan Inggris

Mark Canning, Duta Besar Inggris untuk Indonesia

Penduduk Wilayah Kepala Burung Papua

EAST\77095033.1

Kapten Inf. D Aronggear, Danramil Babo
Samsul Bahri Fiawe, Kepala Kampung Nusei, Babo
Hayum Fimbay, Kepala Kampung Kanaisi, Babo
Jafar Fimbay, Ketua PBM -Tokoh masyarakat, Babo
Ningsih Fimbay, Kepala Koperasi Ma Tambeysiri, Babo
Saleh Fimbay, Kepala Kampung Modan, Babo
Rudi Hardjo, Camat Babo
Abdullah Manuama, Kepala Kampung Amutu, Babo
Bernard Nafurbenam LMA, Babo
Hamis Nauri, Kepala Kampung Irarutu III, Babo
Umar Nauri, Kepala Kampung Kasira, Babo
Muin Rita Rita, Kepala Sekolah SMU Negeri, Babo
AKP Daniel Sarampang, Kapolsek Babo
Agus Suharjo, Camat, Babo
Said Bauw-Warga kampung di Babo
Kartini Refideso- Warga kampung di babo
Fayakum Fimbay- Warga kampung di babo
Anshory Manuama- Warga kampung di Babo

Onar:

Rafael Agofa- Kepala Kampung Onar Baru
Anton Soway- Kepala Kampung Onar Baru
Yakonias Wayuri-Tokoh masyarakat kampung Onar
Hanokh Siwana-petani di Onar
Arifin Agofa- petani di Onar
Septon Wayuri-warga kampung di Onar
Yohanes Agofa- warga kampung di Onar
Apia Kamisopa- warga kampung di Onar
Lebrina Wayuri- warga kampung di Onar
Titus Inanosa- warga kampung di Onar
Abubakar Solowat- warga kampung di Taroy
Hasan Bauw- Perwakilan BP di Kampung
John Utres-Tokoh Masyarakat Onar

Taroy:

Ridwan Solowat-Kepala Kampung Taroy
Abdul Nabi Kadir-Kepala Kampung Pera-Pera
Muhammad Bauw-Kepala Kampung Tambanewa
Isac Asmorom-Kepala Kampung Sorondauni
Abubakar Solowat-Ketua LMA
Hasan Bauw-Perwakilan Kampung
Saidin Bauw-Kepala koperasi
Jaman Nabi-Sekretaris koperasi
Ibrahim Solowat-Bendahara koperasi

Lembaga Swadaya Masyarakat

BSK (Andi Kurniadi, Manajer Program; dan Adbul Basid, Supervisor Lapangan)

ELSHAM Papua (Ferry Marisan, Direktur; Matius Rumbrapuk, Staf; dan Zandra Mambrasar,

Staf)

FOKER LSM Papua (John Liem: Steering Committee, dan Lien Maloali: Sekretaris Eksekutif)

Komnas HAM Papua (Frits Ramandey : Direktur, Yohana Tukayo: Staf dan Kristina Kensimai : Staf)

LP3BH Manokwari - Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum

(Andris Wabdaron,: Koordinator LSM di Papua Barat

Threstje J. Gaspersz, SH: Kepala Divisi Program Pemberdayaan Wanita dan Anak-

Anak Simon R. Banundi, SH: Koordinator kontak kantor di Bintuni

Semuel H. Yensenem, SH: Koordinator kerja sama)

Muhammadiyah Bintuni (Sistoyo, Kepala Muhammadiyah Bintuni)

World Wildlife Fund-Indonesia (Budi Satyawan Wardhana -Director Kebijakan, Keberlanjutan dan Transformasi)

WWF Region Papua (Benja Victor Mambay, Direktur)

YSA (Yayasan Sosial Agustinus), Manajer Operasional Suster Zita.

YSA (Suster Cita, Manajer Operasional, Yayasan Sosial Agustinus)

YPK Bintuni (Daniel Sebaru, S.Sos, MM, Kepala YPK Bintuni)

YPPK Bintuni (Pastor Belo Boli, SVD, Kepala YPPK Bintuni)

YPMD (Decky Rumaropen, Direktur, Nicolas M dan Eddy D. Ohoiwata, Pice Inaury,

Aiesh Rumbekwan, Patricia M, dan Lusiana)

Sektor Swasta

Bower Asia Group (Douglas Ramage)

Institute for Policy Analysis of Conflict (Sidney Jones, Direktur; dan Cillian Nolan, Wakil)

Institusi Akademis di Papua and Papua Barat:

Dr. Suriel S. Mofu, Rektor UNIPA

Ir. Yohanes S. Budiyo, M.S, Asisten Rektor IV - UNIPA

Deny A. Iyai, Dosen, Koordinator Kerja Sama - UNIPA

Ir. Frederik Luhulima, Dosen : Koordinator Program Bagi Hasil Pendapatan- UNIPA

UGM (Universitas Gadjah Mada) (Agus Joko Pitoyo, Dosen dan Peneliti; Dr. Setiadi

Prabowo, M.Si, Dosen dan Peneliti; dan Anna Marie Wattie, Dosen dan Peneliti)

Individu:

Shofwan Azhar, SE, M.Sc., Dosen, IKOPIN

Haryono, S.Sos., Peneliti, Pusat Penelitian Universitas Indonesia

Drs. Johszua Robert Mansoben, M.A., Ph.D, Dosen, Universitas Cenderawasih

Lucy Mitchell, Konsultan Independen

Pendeta Herman Saud

Editor Senior Jakarta Post, Sabam Siagian

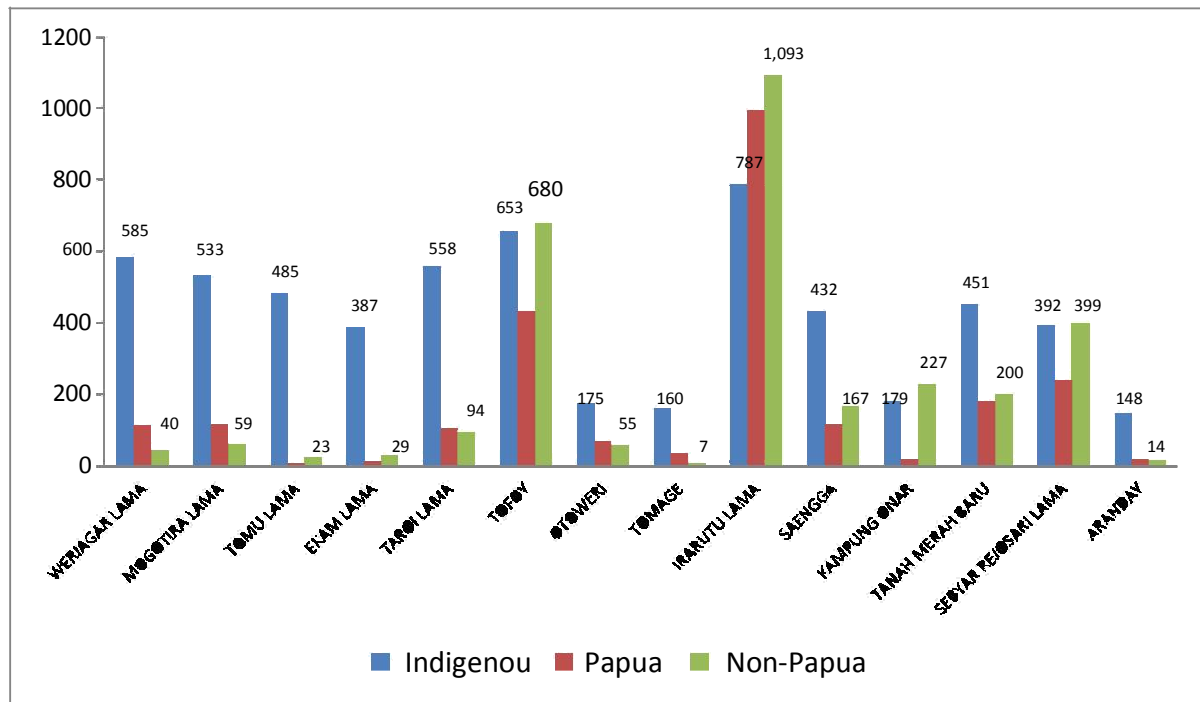
Agus Sumule, Konsultan Independen

Sonny Wibisono, S.Sos., Peneliti, Pusat Penelitian Universitas Indonesia

APENDIKS III

DATA GRAFIK DARI SENSUS DAN SURVEI SOSIAL EKONOMI UGM DI KABUPATEN TELUK BINTUNI 2013

Persentase Populasi berdasar Masyarakat Adat di Tiap Kampung, 2013



Pendapatan Rumah Tangga per Kampung di DAV dan IDAV (2005-2013)

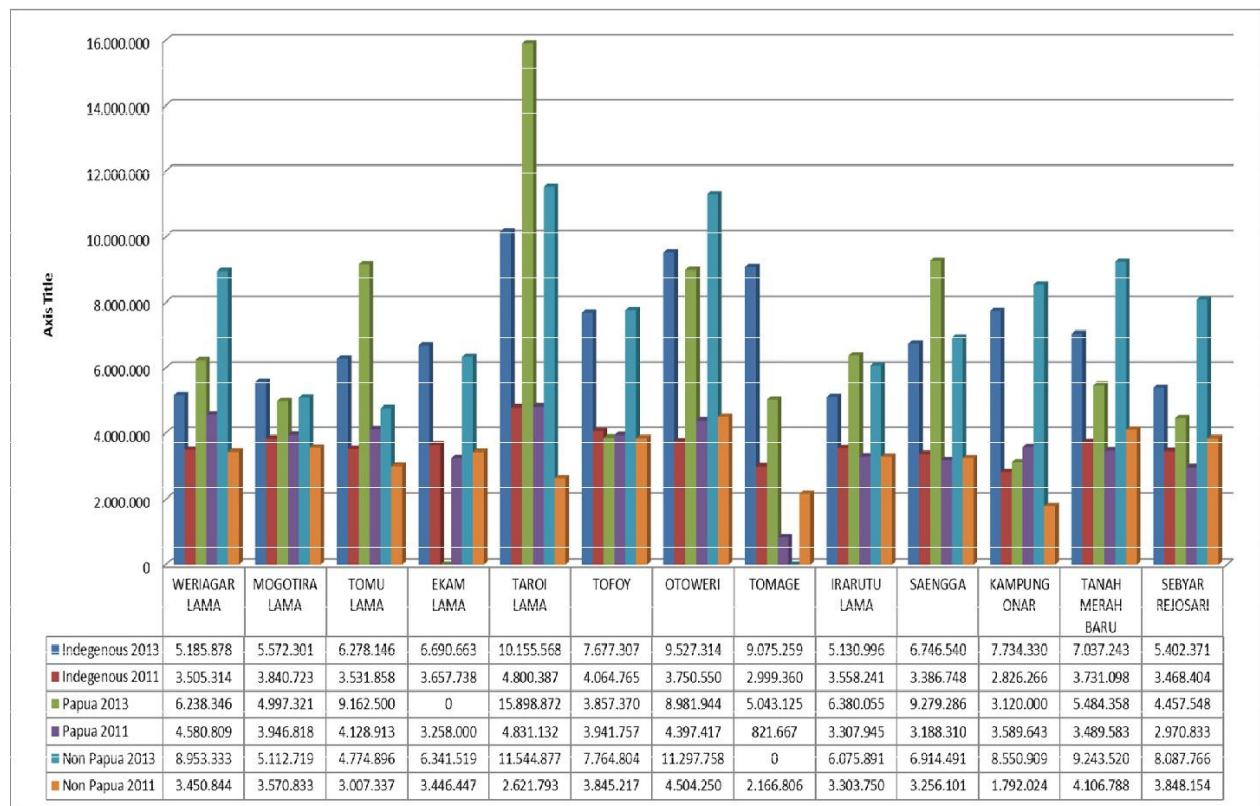
Kampung	2001*	2003**	2005	2009	2011	2012	2013	% Peningkatan sejak 2003	% Peningkatan sejak 2011
Weriagar	1,305,000	1,184,000	1,684,865	3,218,810	3,760,179	5,886,281	5,676,488	379	51
Mogotira		1,569,000	1,525,333	2,209,815	3,416,493	6,456,924	5,409,371	245	58
Sebyar Rejosari	559,000	N/A	1,148,210	2,601,348	3,334,551	5,001,125	6,781,912		103
Tomu	507,000	1,300,000	967,380	2,522,468	3,411,977	6,273,815	6,233,615	380	83
Ekam		1,340,000	1,602,973	2,442,581	3,739,259	6,355,638	6,630,234	395	77
Taroy	790,000	1,052,000	2,398,230	2,808,784	2,501,467	7,448,877	11,175,334	962	347
Otoweri	N/A	1,158,000	2,665,085	2,046,667	4,332,845	3,614,893	9,904,120	755	128
Tomage			2,100,556	2,292,059	2,863,322	NA***	8,342,144	620	191
Irarutu 3	328,000	N/A	1,367,845	2,785,712	4,002,807	6,149,675	5,928,134		48
TMB		1,526,000	2,250,729	2,834,975	3,622,219	6,312,127	7,508,058	392	107
Saengga	840,000	1,526,000	2,250,729	2,555,117	3,519,952	5,017,447	7,092,412	365	101
Onar	N/A	1,268,900	1,286,188	1,295,850	2,331,642	4,314,545	8,163,305	543	250
Tofoi	504,000	1,383,000	1,302,382	2,507,858	4,298,686	NA***	6,965,112	404	62
Average		1,349,878	1,734,654	2,470,926	3,387,025	6,283,135	6,907,856	412	104

* Survei Demografik Sosial, Ekonomi dan Budaya di bulan Maret - April 2001 : Kerja sama antara UNCEN dan PT. INTERSYS – disediakan untuk dokumen AMDAL 2002.

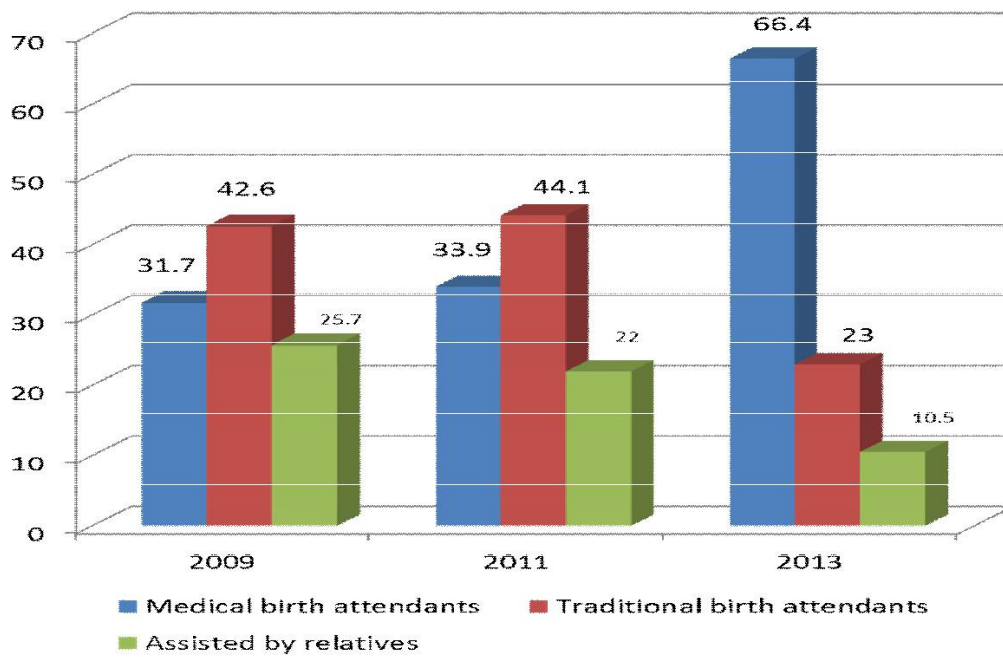
**Sensus Sosial Ekonomi UNCEN 2003. Perlu dicatat bahwa angka pendapatan rumah tangga untuk Otoweri & Tomage di tahun 2003 sama, sebelum dimekarkan menjadi dua kampung pada 2004-2005.

*** Perlu dicatat bahwa di tahun 2012, Tomage dan Tofoi tidak diikutsertakan dalam survei pendapatan cepat.

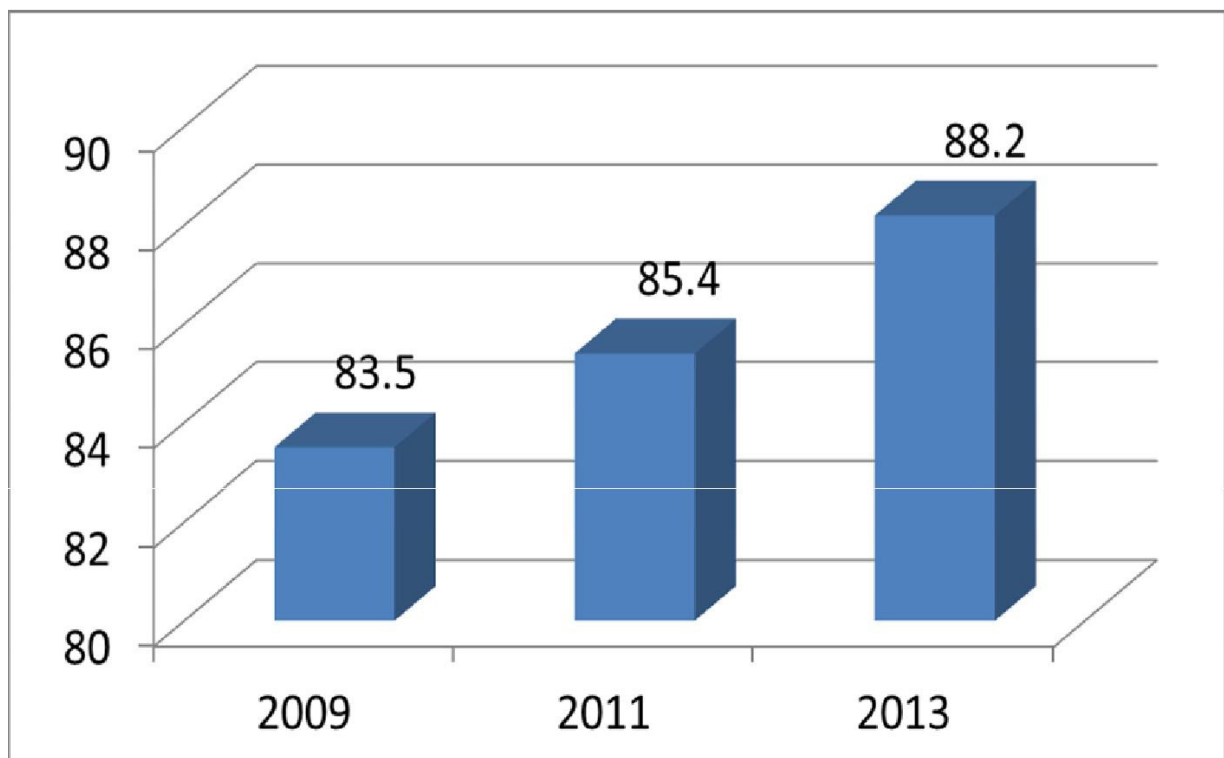
Pendapatan Berdasarkan Status (Masyarakat Adat dan Migran)



Indikator Kesehatan: Pendampingan Persalinan, 2009 – 2013



Indikator Kesehatan: Balita yang Diimuniasi Penuh Sesuai Usia Mereka



Indeks Kesejahteraan DAV dan IDAV

Welfare Index			
Kampung	Tahun 2009	Tahun 2011	Tahun 2013
Weriagar	54.57	61.76	66.25
Mogotira	56.62	58.86	64.16
Sebyar Rejosari	83.58	75.16	78.72
Tomu	49.42	57.85	60.95
Ekam	56.18	57.58	64.88
Taroy	57.43	60.19	72.68
Otoweri	62.28	74.73	80.52
Tomage	67.06	69.40	76.91
Irarutu 3	80.79	82.03	77.94
Tanah Merah Baru	77.49	79.00	76.35
Saengga	74.22	73.84	77.01
Onar	68.20	75.75	80.16
Tofoi	77.53	81.56	81.06
Rata-Rata	66.57	69.83	73.66

APENDIKS IV

BAGI HASIL UNTUK GAS ALAM PRODUKSI PAPUA BARAT

Pajak Tanah dan Bangunan

Pemerintah Pusat = 10%
Pemerintah Daerah = 90%

Bea Cukai

Pemerintah Pusat = 20%
Pemerintah Daerah = 80%

Pendapatan Sumber Daya Alam

Pemerintah Pusat = 30%
Pemerintah Daerah = 70% (Otonomi Khusus)

Provinsi = 16%
Kabupaten = 64%

Kabupaten Penghasil = 12%
Kabupaten lain di Provinsi = 12%
Provinsi = 46%

Semua Provinsi = 6% (Otonomi Daerah)
Oleh Perdasus = 40% (Otonomi Khusus)

20%

20%

Provinsi = 4%
Kabupaten Penghasil = 7%
Kabupaten lain di Provinsi = 7%
Pendidikan Lanjutan di Provinsi = 2%

Dana perwalian dikelola adat = 10%
Pengembangan masyarakat lokal = 10%